

**STRATEGI DAN AKSELERISASI
PENINGKATAN MUTU JURUSAN/PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**LAPORAN PENELITIAN
Mendapat Bantuan Dana
Dari DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Tahun Anggaran 2011**



Tim Peneliti:

Ketua : Dr. H. M Subandi, MP
Anggota : - Dr. H. Abdul Kodir, M. Ag.
- Drs. Taupikurahman, M. Ag.
- Drs. H. A. Rusdiana, MM

**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2011**

ABSRTRAK

Penelitian ini, mengkaji Strategi Dan Akselerisasi Peningkatan Mutu Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Fakultas Sains Dan Teknologi. Diketahui, bahwa Peningkatan mutu Program Studi menjadi persoalan manakala sumberdaya pendukung keseluruhan sistem program studi/jurusan menunjukkan gejala yang rendah. Persoalan ini bertumpu pada komponen-komponen manakala yang menjadi penyebab rendahnya mutu Program Studi?, dan pengelolaan yang bagaimana jika terdapat gejala yang rendah?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini, menunjukan bawa: Kondisi Internal; (a) Kerja Sama yang baik antar dosen dan karyawan, (b) Input Mahasiswa yang selektif, (c) Dosen yang mempunyai banyak pengalaman praktis, (d) Banyaknya kerja sama yang telah dilakukan dengan lembaga luar dapat meningkatkan mutu dosen dan mahasiswa dengan sistem *link & macth*. Kondisi Eksternal; (a) kerjasama dengan Lembaga swasta dan pemerintah yang berhubungan erat dengan disiplin ilmu dalam hal penyediaan tenaga ahli telah meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa, (b) Dengan adanya pembangunan gedung baru dan fasilitas baru memungkinkan pengembangan laboratorium secara professional bisa terwujud, (c) Banyaknya program besasiswa dari Pemerintah dan Asing yang mengarah kepada pembinaan dan peningkatan kualitas dosen belum termanfaatkan. Komponen-komponen yang mendukung untuk peningkatan mutu jurusan yaitu: Manajemen dan Kelembagaan: (1) Penyelenggaraan sistem penjaminan mutu di tingkat program studi, (2) Penyelenggaraan manajemen kelembagaan yang mengacu kepada indikator kinerja yang jelas, (3) Pengembangan kerjasama dengan kalangan industri sebagai upaya berkelanjutan meningkatkan kompetensi dosen dan lulusan, (4) Pengembangan kerjasama dengan penyelenggara pendidikan di dalam dan luar negeri, (4) Penyelenggaraan kerjasama dengan asosiasi-asosiasi keahlian. Kendala yang dihadapi peningkatan mutu jurusan/program studi adalah (a) Belum adanya mekanisme kontrol terhadap indikator keberhasilan. (b) Keterbatasan SDM dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang tinggi. (c) Tradisi Akademik yang masih mencari pola karena masih baru. (d) Masih terbatasnya program-program untuk peningkatan kualitas SDM terutama berkaitan dengan PBM. (e) Masih kurangnya informasi dalam pengembangan SDM. (f) Mekanisme evaluasi kinerja dosen belum berjalan secara maksimal. (g) Belum adanya gedung sendiri menyebabkan keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana akademik. (h) Masih terbatasnya tenaga dosen, menyebabkan banyak dosen luar biasa/kontrak yang harus diambil (i) Banyaknya beban SKS di setiap dosen, sehingga konsentrasi pada hasil karya ilmiah dan penelitian kurang maksimal. Langkah-langkah upaya yang telah dilaksanakan dalam peningkatan mutu jurusan/program studi sebagai berikut, (a) pengembangan dan penataan lembaga pelaksana akademik dan penunjang akademik, jurusan, program studi, laboratorium, studio, kebun percobaan, kebun praktek, perpustakaan. (b) pembinaan, pengawasan dan pengendalian pegawai berkala berbasis kinerja dan produktivitas peningkatan pelaksanaan anggaran secara terencana, efektif dan efisein (c) peningkatan pelaksanaan anggaran secara terencana, efektif dan efisein, (d) mampu menggalang dana untuk program akademik dari luar institusi melalui kontrak kerja, kemitraan, hasil penelitian, karya akademik, dan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki, (e) meningkatnya kuantitas dan kualitas referensi, (f) seminar dan lokakarya penyusunan Kurikulum semua program studi sesuai kebutuhan mahasiswa dan pasar, (g) pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran, (h) Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil penelitian, (i) penyusunan strategi pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan, (j) Pemantapan & optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak (dalam dan luar negeri) yang telah menandatangani MoU dengan UIN, (k) mengembangkan Sistem Informasi Terpadu, yang mencakup sistem informasi akademik, kepegawaian, administrasi, sarana prasarana, pendanaan, kerjasama, dan lainnya, (l) menetapkan sasaran mutu, memonitor dan evaluasi pencapaian mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, SDM, kinerja, administrasi, pendanaan, infrastruktur, dan semua unsur penunjang lainnya.

ABSTRACT

This study examines the Strategy and Acceleration of Quality Improvement of Department / Study Program in Faculty of Science and Technology. It is known that the Improvement of the quality of the Study Program becomes an issue when the overall support resources of the study program system / department are low. This issue rests on which components are the cause of the low quality of the Study Program ?, and what if the management of symptoms is low ?. This research uses descriptive method with qualitative approach. This study, addressed: Internal Condition; (b) Selective student input, (c) Lecturers who have a lot of practical experience, (d) The number of partnerships that have been done with outside institutions can improve the quality of lecturers and students with the system link & mach. External Condition; (b) With the construction of new buildings and new facilities allow the development of professional laboratories can be realized, (c) number of Government and Foreign Students Program which leads to guidance and quality improvement of lecturers has not been utilized. Components that support to improve the quality of the department are: Management and Institutional: (1) Implementation of quality assurance system at the level of study program, (2) Organizational management that refers to clear performance indicators, (3) Development of cooperation with industry ongoing efforts to increase the competence of lecturers and graduates, (4) Development of cooperation with education providers at home and abroad, (4) Conducting cooperation with skills associations. The obstacles faced by the improvement of the quality of the department / study program are (a) The absence of a control mechanism on success indicators. (b) Limited human resources compared to high number of jobs. (c) Academic Traditions that are still looking for patterns as they are new. (d) The limited number of programs to improve the quality of human resources is primarily related to PBM. (e) Still lack of information in human resource development. (f) Lecturer performance evaluation mechanism has not run maximally. (g) The absence of the building itself has limited the provision of academic facilities and infrastructure. (h) The limited number of lecturers, causing many extraordinary lecturers / contracts to be taken (i) The number of credits loaded in each lecturer, so that the concentration on the scientific and research work is not maximal. Measures that have been implemented in improving the quality of departments / courses as follows, (a) the development and structuring of academic and academic support institutions, departments, study programs, laboratories, studios, experimental gardens, practice gardens, libraries. (b) the development, supervision and control of periodic performance-based employees and the productivity of budget enhancement in a planned, effective and efisein (c) improvement of planned, effective and efisein budget execution, (d) able to raise funds for academic programs from outside institutions through contract (e) increasing the quantity and quality of references, (f) seminars and workshops of curriculum preparation of all courses according to the needs of students and markets, (g) implementation of learning and evaluation (j) Increasing the quality and quantity of the results of the research, (i) the preparation of community-based empowerment strategy, (j) Stabilization & optimization of cooperation with various parties (domestic and foreign) who have signed the MoU with UIN, (k) develop an Integrated Information System, which includes academic information system, kepegaw (l) establish quality objectives, monitor and evaluate the achievement of quality in education, research and community service, human resources, performance, administration, funding, infrastructure and all elements other support.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah berkat pertolongan Allah swt. penelitian tentang “Strategi dan Akselerasi Peningkatan Mutu Jurusan/Program Studi di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung” ini selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Judul tersebut dipandang urgen diangkat sehubungan dengan kondisi Jurusan/Program Studi di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada umumnya masih memerlukan perhatian yang serius. Hal ini terlihat secara jelas pada hasil audit internal mutu, maupun hasil akreditasi program studi oleh BAN-PT. Sehingga dipandang perlu diketahui dan dianalisis serta dicarikan solusi untuk peningkatan mutu jurusan/prodi pada masa mendatang.

Peningkatan mutu merupakan kewajiban seluruh komponen jajaran yang terkait dalam pengembangan program studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Di lain pihak, tuntutan mutu terhadap perguruan tinggi semakin meningkat. Perguruan tinggi yang bermutu, unggul dan kompetitif akan memperoleh mahasiswa dan lulusan yang bermutu tinggi serta dapat memuaskan seluruh *stakeholder*. Sehingga penelitian ini merupakan upaya strategis untuk menunjang pencapaian visi UIN dan Fakultas Sains dan teknologi untuk menjadi perguruan tinggi yang bermutu, unggul dan kompetitif.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :

1. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dana bagi kegiatan penelitian ini;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan jajarannya yang telah membantu memberikan saran pemecahan masalah penelitian baik secara substantif maupun teknis;
3. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, atas dorongan dan masukan berharga bagi penyempurnaan desain penelitian;
4. Para Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Fakultas Sains dan Teknologi yang telah memberikan data informasi pengembangan jurusan/program studi yang cukup penting bagi kelangsungan penelitian.

5. Semua pihak yang telah sukarela memberikan bantuan secara akademik maupun teknis sampai penelitian ini selesai.

Sebagai pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung sudah selayaknya mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt.

Tim peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini bukan merupakan hasil yang sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dengan sangat terbuka kami terima untuk kesempurnaan dan perbaikan penelitian ini.

Akhirnya, semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat dimanfaatkan.

Bandung, 6 Desember 2011

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

ABSRTRAK	i
ABSRTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka berfikir Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Tinjauan Teori Mutu Pendidikan	11
1. Konsep Mutu Pendidikan	11
2. Prinsip-prinsip Mutu Pendidikan.....	12
3. Ciri-ciri Mutu Pendidikan.....	13
4. Sifat-sifat Mutu Pendidikan.....	13
5. Penggunaan Mutu Pendidikan.....	14
6. Tingkat Mutu Pendidikan Pendidikan Tinggi	14
7. Model Pendidikan Tinggi Bermutu	15
B. Tinjauan Strategi Akselerasi Peningkatan Mutu Jurusan	18
1. Konsep Strategi Akselerasi.....	18
2. Presfektif Jurusan/Program Studi	19
3. Manajemen Peningkatan Mutu Jurusan/Program Studi	20
BAB III METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	47
B. Jenis data	47
C. Sumber Data dan Lokasi Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Pengolahan dan Analisis Data	51
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A.Strategi Peningkatan Mutu Jurusan	53
B.Program Akselerasi Peningkatan Mutu Jurusan	54
C.Indikator Kinerja Program Akselerasi Peningkatan Mutu Jurusan	58
1. Orgsnisasi Manajemen	63
2. Pendididkan Dan Kemahasiswaan.....	66
3. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,.....	69
4. Kerjasama Institusional,	70
5. Bidang Penunjang Penyelenggaraan	70
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi	75
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini tuntutan mutu terhadap perguruan tinggi semakin meningkat. Perguruan tinggi yang bermutu, unggul dan kompetitif akan memperoleh mahasiswa dan lulusan yang bermutu tinggi serta dapat memuaskan seluruh *stakeholder*. Untuk menjadikan perguruan yang unggul dan kompetitif.

Kita jarang mendengar dewasa ini tentang retorika mutu atau kualitas, yang dalam kehidupan sehari-hari, selalu diterjemahkan bahwa sesuatu yang bermutu identik dengan baik/tidaknya suatu barang/jasa, termasuk juga bidang kajian mutu pendidikan yang akhir-akhir ini sangat gencarnya dibicarakan. Mutu secara umum dapat diartikan sebagai derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja baik berupa barang atau jasa. Mutu dalam pendidikan dapat ditinjau dari aspek input, proses, output dan dampak serta manfaat.

Dalam perkembangannya tuntutan perguruan tinggi saat ini bukan hanya sebatas kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang diukur secara akademik, melainkan keseluruhan program dan lembaga perguruan tinggi harus mampu membuktikan mutu yang tinggi yang dapat didukung oleh akuntabilitas yang tinggi pula. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, perguruan tinggi melalui program studinya perlu memperoleh kepercayaan masyarakat dengan pernyataan jaminan kualitas atau mutu (*quality assurance*), pengendalian mutu (*quality control*), dan perbaikan mutu (*quality improvement*). Jaminan, pengendalian, dan pembinaan atau perbaikan mutu itu hanya dapat diberikan kepada perguruan tinggi atau program studi setelah kepadanya dilakukan evaluasi yang cermat melalui proses akreditasi secara nasional dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN-PT). Maka jaminan, pengendalian, dan pembinaan atau perbaikan mutu di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi suatu keniscayaan. Penjaminan mutu tersebut bertitik tolak dari penetapan dan pemenuhan standar mutu secara menyeluruh, konsisten, bertahap, dan berkelanjutan.

Mutu, dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai derajat keunggulan

suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang atau jasa. Mutu dapat bersifat abstrak, namun dapat dirasakan, baik itu berupa barang atau jasa. Oleh karena itu makna mutu akan berbeda antara orang yang satu dengan orang lainnya, tergantung dari sudut pandang dan kebutuhannya (Sallis, 1993). Dalam konteks pendidikan banyak pendapat tentang mutu. Namun demikian, kajian tentang mutu dalam pendidikan dapat ditinjau dari aspek input, proses, output dan dampak serta manfaat.

Pendidikan yang bermutu mengacu pada berbagai input seperti tenaga pengajar, peralatan, buku, biaya pendidikan, teknologi, dan input-input lainnya yang diperlukan dalam proses pendidikan. Ada pula yang mengaitkan mutu pada proses (pembelajaran), dengan argumen bahwa proses pendidikan (pembelajaran) itu yang paling menentukan kualitas. Jika mutu ingin diraih, maka proses harus diamati dan dijadikan fokus perhatian. Melalui proses, penyelenggara pendidikan dapat mengembangkan pendidikan, metode, dan teknik-teknik pembelajaran yang dianggap efektif. Orientasi mutu dari aspek output mendasarkan pada hasil pendidikan (pembelajaran) yang ditunjukkan oleh keunggulan akademik dan nonakademik di suatu sekolah.

Banyak lembaga pendidikan yang mulai sadar bahwa antara berbagai input, proses, dan output, perlu diperhatikan secara seimbang. Bahkan untuk menjamin mutu, langkah-langkah sudah dimulai dari misi, tujuan, sasaran, dan target dalam bentuk desain perencanaan yang mantap. Para pendidik harus selalu sadar akan hasil yang akan diperoleh bagi siswa setelah melalui proses pembelajaran tertentu, dan gambaran akan hasil yang ingin dicapai itu pada gilirannya akan memberikan motivasi untuk mengembangkan input dan proses yang sesuai. Bahkan saat ini mutu pendidikan tidak hanya dapat dilihat dari prestasi yang dicapai, tetapi bagaimana prestasi tersebut dapat dibandingkan dengan standar yang ditetapkan, seperti yang tertuang di dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 35 dan PP No. 19 Tahun 2005.

Penetapan standar untuk melihat mutu pendidikan masih banyak yang didasarkan pada keinginan yang kuat dari pengguna (customer) dan pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan. Termasuk pengguna (customer) dan pemangku kepentingan adalah siswa, guru, orang tua pengguna jasa pendidikan, pengguna jasa lulusan yang menuntut kompetensi tertentu sebagai indikator kelayakan bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan,

atau berbagai peran dalam kehidupan sosial yang merupakan output pendidikan. Sementara masalah input dan proses dianggap sebagai masalah internal sekolah yang merupakan prerogatif profesi tenaga kependidikan. Sebenarnya, input, proses, dan output tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya merupakan masalah internal atau eksternal yang akan menentukan mutu pendidikan sekolah.

Dari segi lingkup kompetensi yang harus dicapai begitu luas. Pandangan tentang mutu pun kemudian meliputi berbagai aspek kompetensi. Bukan hanya menyangkut ranah kognitif tetapi juga afektif, psikomotor, dan bahkan spiritual. Mutu tidak hanya terfokus pada pencapaian atau prestasi akademis (*academic achievement*), tetapi juga bidang-bidang nonakademik, seperti prestasi seni, keterampilan sosial, keterampilan vokasional, serta penghayatan dan pengamalan spiritual dalam bentuk budi pekerti luhur. Yang sering menjadi masalah adalah bagaimana menilai secara akurat berbagai aspek kompetensi tersebut. Apalagi kalau seluruhnya harus berdasarkan standar nasional. Sementara itu, sebagian ranah kemampuan yang dicapai untuk sebagian relatif sukar mengukurnya. Beberapa jenis kompetensi juga banyak yang lebih bersifat lokal, seperti keterampilan vokasional, keterampilan sosial, serta budi pekerti.

Menurut Sallis (1993), terdapat tiga pengertian konsep mutu. Pertama, mutu sebagai konsep yang absolut (*mutlak*), kedua, mutu dalam konsep yang relatif, dan ketiga mutu menurut pelanggan. Dalam pengertian absolut, sesuatu disebut bermutu jika memenuhi standar yang tertinggi dan tidak dapat diungguli, sehingga mutu dianggap sesuatu yang ideal yang tidak dapat dikompromikan, seperti kebaikan, keindahan, kebenaran. Mutu dalam konsep ini menunjukkan keunggulan status dan posisi dengan mutu tinggi (*high quality*). Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka konsep mutu absolut bersifat elit karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang dapat memberikan pendidikan dengan *high quality* kepada siswa, dan sebagian besar siswa tidak dapat menjangkaunya.

Fakultas Sains dan Teknologi merupakan salah satu unsur organik di lingkungan UIN Bandung mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membuktikan jaminan, pengendalian, dan pembinaan atau perbaikan mutu. Untuk menuju ke arah itu, Fakultas Sains dan Teknologi berupaya menyiapkan dan membenahi berbagai aspek dan komponen pendidikan. Di antara yang menjadi program pengembangannya adalah penyempurnaan kurikulum, penambahan sarana pra

sarana, peningkatan jumlah dan kualitas dosen, peningkatan kualitas belajar mengajar dan peningkatan sistem evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk memperoleh lulusan yang bermutu.

Hal yang tak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan pendidikan pada Fakultas Sains dan Teknologi adalah aspek peningkatan mutu program Studi/Jurusan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan pemerintah dengan pernyataan jaminan kualitas atau mutu (quality assurance), pengendalian mutu (quality control), dan perbaikan mutu (quqlity impropmnt). Jaminan, pengendalian, dan pembinaan atau perbaikan mutu, dengan mendapat legitimasi formal dari BAN-PT. quality assurance quality control quqlity impropmnt

Meskipun demikian, berbagai upaya telah dilakukan namun hasilnya belum mencapai apa yang diharapkan, terutama apabila dilihat dari hasil Audit Mutu Internal UIN SGD maupun hasil akreditasi program studi yang dilakukan oleh BAN-PT, nilainya belum memuaskan.

Berdasarkan data sementara, hasil evaluasi program studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi

Tabel. 1.1

Peringkat Mutu Program Studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi

No.	Jurusan /Program Studi	Peringkat Mutu	
		AMAI	Akreditasi BAN-PT
1.	Matematika	B	C
2.	Biologi	B	C
3.	Fisika	C	-
4.	Kimia	C	-
5.	Teknik Inforamatia	C	C
6.	Agro Teknologi/TP	C	-
7.	Teknik Elektro	C	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata peringkat mutu Program studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi apabila dilihat hasil audit mutu internal maupun akredatasi BAN-PT, peringkatnya mutu nya masih rendah.

Dengan menyoroti perolehan peringkat mutu ketujuh jurusan/program studi di atas maka dapat dipermasalahkan bagaimana pormulasi strategi akselerasi peningkatan mutu program studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Masalah ini kemudian penulis angkat ke dalam judul

:

“Strategi Akselerasi Peningkatan Nilai Mutu Program Studi di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung” (Studi Kasus pada 7 Program Studi/Jurusan di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2011).

B. Perumusan Masalah

Peningkatan mutu Program Studi menjadi persoalan manakala sumberdaya pendukung keseluruhan sistem program studi/jurusan menunjukkan gejala yang rendah. Persoalan ini bertumpu pada komponen-komponen manakah yang menjadi penyebab rendahnya mutu Program Studi?, dan pengelolaan yang bagaimana jika terdapat gejala yang rendah?.

Persoalan tersebut dapat ditelusuri salah satunya dengan menelaah dan menganalisis keseluruhan komponen sistem jurusan/program studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung, yang mencakup masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak (*input, process, output, autcome, and impact*) berdasarkan data, informasi dan bukti-bukti lainnya yang berkenaan dengan komponen-komponen sistemik dari seluruh penyelenggaraan program peningkatan mutu di 7 Program Studi/Jurusan di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung. Dengan cara ini dapat diketahui kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang bagi peningkatan mutu Jurusan/program studi. Karena itu, beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi objektif analisis KKPA/SWOT Jurusan / Program Studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi?
2. Komponen-komponen apa saja yang dipandang perlu mendapat perhatian untuk peningkatan mutu Jurusan / Program Studi (dalam bentuk matrik)?
3. Bagaimana bentuk strategi peningkatan mutu Jurusan / Program Studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi?
4. Bagaimana Program peningkatan mutu Jurusan / Program Studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi?
5. Bagaimana indikator kinerja program peningkatan mutu Jurusan / Program Studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi?
6. Kendala apa yang dihadapi dalam peningkatan mutu Program Studi?

7. Langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk akselerasi peningkatan mutu Program Studi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui komponen-komponen peningkatan mutu Jurusan / Program Studi?
2. Untuk mengetahui bentuk kegiatan peningkatan mutu Jurusan / Program Studi?
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam peningkatan mutu Jurusan / Program Studi?
4. Untuk mengetahui langkah strategis yang perlu dilakukan untuk akselerasi peningkatan mutu Jurusan / Program Studi?

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk :

1. Membantu dalam identifikasi masalah, penilaian program dan pencapaian sasaran.
2. Memperkuat budaya evaluasi kelembagaan (institutional evaluation) dan analisis-diri.
3. Memperkenalkan staf baru kepada keseluruhan program studi/ lembaga.
4. Memperkuat jiwa korsa dalam lembaga, memperkecil kesenjangan antara tujuan pribadi dan tujuan lembaga dan mendorong keterbukaan.
5. Mendorong jurusan / program studi/ dan lembaga perguruan tinggi untuk meninjau kembali kebijakan yang telah usang.
6. Memberi informasi tentang arah kebijakan yang akan meningkatkan status program studi/perguruan tinggi dibandingkan dengan program studi/perguruan tinggi lain.

D. Kerangka berfikir Penelitian

Secara umum mutu adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Mutu suatu lembaga pendidikan tinggi dapat diartikan sejauh mana perguruan tinggi tersebut mempunyai makna dari para *stakeholders*-nya, dengan dapat tidaknya menyajikan kinerja (produk), perilaku pengelola yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, etika akademik, agama, dan nilai budaya. Daulat P.Tampubolon, dalam bukunya Perguruan Tinggi Bermutu (2001:123),

menegaskan, akuntabilitas atau mutu perguruan tinggi dapat dilihat yaitu:

“(a) apakah peraturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dapat dipertanggung jawabkan secara undang-undang? (b) apakah materi kuliah yang diberikan dosen dapat dipertanggung-jawabkan secara kurikuler dan etika akademik?, (c) apakah nilai hasil ujian (IP/IPK) yang diperoleh mahasiswa terpercaya?, (d) Apakah perilaku (sikap) pelayanan para pengelola perguruan tinggi dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, etika, agama, dan nilai budaya?, (e) apakah penelitian yang dilakukan dan hasilnya tidak bertentangan dengan agama dan atau undang-undang?, serta (f) apakah perguruan tinggi mempunyai kode etik?”

Ripley memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan (Ripley & Franklin, 1986: 11). Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Menurut Ripley, paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni: (1) banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan (2) adanya program yang tidak didesain dengan baik. Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian.

Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Grindle, 1980: 7).

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: (1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses

implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Perolehan mutu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam konteks program studi yang bermutu dipengaruhi faktor *input*, *proses*, *output*, dan *inpact*.

1. Masukan *input*, mencakup komponen: Visi dan misi program studi, sasaran dan tujuan, mahasiswa, sumberdaya manusia, kurikulum, sarana prasarana, dan pembiayaan.
2. Proses *proses*, mencakup komponen: Tata pamong (*governance*), pengelolaan, program, kepemimpinan, proses pembelajaran, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Keluaran/Hasil *output*, mencakup komponen: Lulusan, keluran lainnya, publikasi hasil penelitian dan atau produk penelitian dalam bentuk patent, rancang bangun, prototip, perangkat lunak, dsb.
4. Dampak *inpact*, mencakup komponen: Sistem informasi, sistem peningkatan dan penjaminan mutu.

Kesiapan input diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari ngkat kesiapan, input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.

Proses merupakan media untuk berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Dalam pendidikan tinggi berskala mikro (tingkat jurusan/program studi), proses yang dimaksud adalah pengabilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses pengelolaan pembelajaran, proses monitoring dan evaluasi. Sebagai catatan bahwa proses belajar mengajar pada program studi merupakan prioritas tertinggi dibanding dengan proses-proses lainnya.

Output merupakan hasil dari proses/produk satu lembaga dalam bentuk

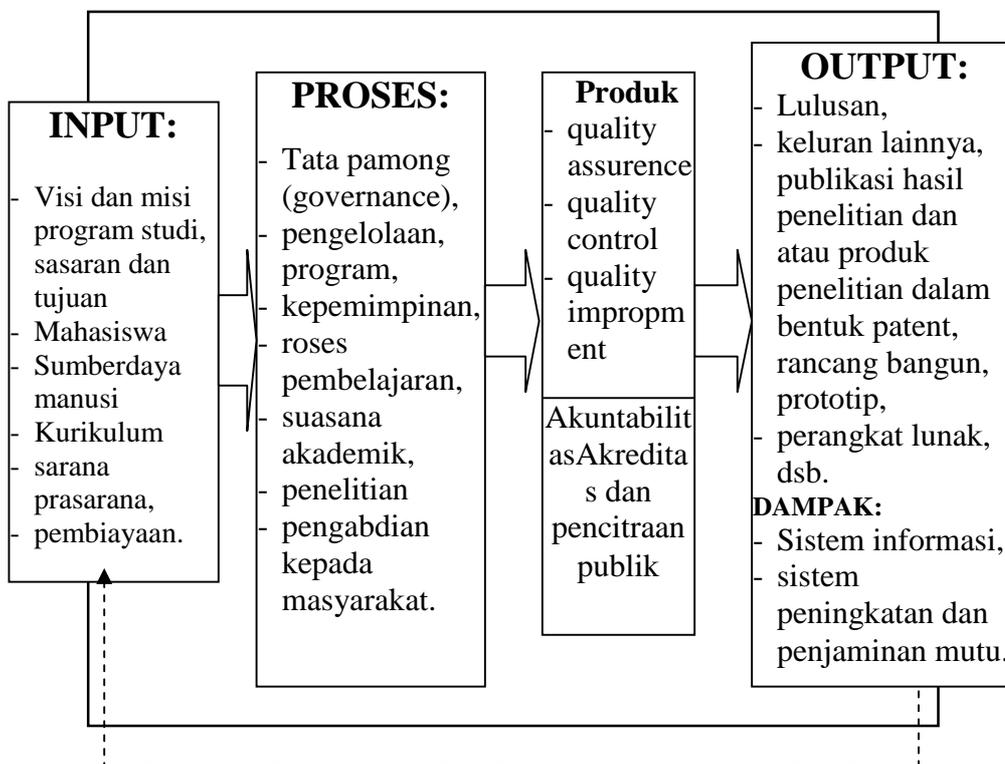
barang dan jasa ukurannya kualitas dan kuantitas, Sedangkan dampak merupakan akibat dari proses mengarah pada hal-hal yang dapat dirasakan oleh pengguna *steakholder*.

Ketiga komponen input, proses, dan output tersebut memegang peranan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan jurusan. Dalam kerangka inilah jurusan memposisikan dirinya untuk berkenambungan memperbaiki dan meningkatkan fungsi dari komponen-komponen tersebut.

Klasifikasi tersebut dibuat sehubungan pentingnya tinjauan mutu pada masing-masing komponen indikator mutu dapat dikaitan dengan pernyataan mutu program studi tinggi, apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pepaduan input pada program studi (dosen, mahasiswa, kurikulum, sarana, sistem, dsb.) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik, yang dapat dipercaya untuk meningkatkan kualitas mutu program studi.

Kerangka berpikir ini dapat lebih diperjelas dengan skema berikut:

Gambar 1.1 Kerangka berpikir Penelitian



BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Teori Mutu Pendidikan

1. Konsep Mutu Pendidikan

Konsep mutu sebenarnya selain bersifat absolut juga bersifat relatif dari pelanggannya. Mutu pendidikan yang bersifat absolut menunjuk pada suatu produk/jasa yang standar tertentu, dipatok dengan ukuran tertentu oleh suatu lembaga yang memiliki otonomi untuk itu. Mutu suatu produk/jasa yang bersifat relatif berarti tergantung pada konsumennya/pelanggannya bagaimana mereka menetapkan standar kebutuhan dan harapannya.

Mutu secara umum dapat diartikan sebagai derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja baik berupa barang atau jasa. Menurut Sallis (1993), terdapat tiga pengertian konsep mutu. Pertama, mutu sebagai konsep yang absolut (mutlak), kedua, mutu dalam konsep yang relatif, dan ketiga mutu menurut pelanggan. Dalam pengertian absolut, sesuatu disebut bermutu jika memenuhi standar yang tertinggi dan tidak dapat diungguli, sehingga mutu dianggap sesuatu yang ideal yang tidak dapat dikompromikan, seperti kebaikan, keindahan, kebenaran. Mutu dalam konsep ini menunjukkan keunggulan status dan posisi dengan mutu tinggi (high quality). Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka konsep mutu *absolut* bersifat elit karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang dapat memberikan pendidikan dengan *high quality* kepada siswa, dan sebagian besar siswa tidak dapat menjangkaunya. Mutu dalam pendidikan dapat ditinjau dari aspek input, proses, output dan dampak serta manfaat.

Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang di hasilkan. Mutu bukanlah benda magis atau sesuatu yang rumit. Mutu didasarkan pada akal sehat. Filosofi manajemen mutu Dr. W. Edward Deming dikembangkan berdasarkan untuk memperbaiki kondisi kerja bagi setiap pegawai. (Jerome S. Arcoro, 2007:75)

Mutu dalam pendidikan bukanlah barang akan tetapi layanan, di mana Mutu harus dapat memenuhi kebutuhan, harapan dan keinginan semua pihak/pemakai dengan fokus utamanya terletak pada peserta didik (learners). Mutu pendidikan berkembang seiring dengan tuntutan kebutuhan hasil pendidikan (output) yang berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang melekat pada wujud pengembangan kualitas sumber daya manusia (Usman, Husaini, 2006:24).

Sebagai suatu lembaga pendidikan formal dalam pelaksanaan sekolah sangat ditekankan adanya peningkatan mutu sebagai jawaban terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat yang sedang berkembang, sehingga peningkatan mutu sumber daya manusia (*human resources*) dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pendidikan.

Sedangkan bicara masalah mutu pendidikan sering kali yang dibicarakan adalah perbaikan tingkat prestasi siswa atau nilai rapor siswa, dalam sekolah yang bertipe seperti itu tanggung jawab perbaikan mutu pendidikan lebih banyak pada guru. Secara umum para guru hanya terfokus pada pendidikan seorang siswa: membantu siswa belajar dan mendapatkan pengetahuan.

Mengapa peningkatan mutu pendidikan sangat sulit terdapat dua factor, yaitu:

- a. Upaya pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori education production function Hanushek, tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. (Depdikbud, 1999: 68)
- b. Pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. (Depdikbud, 1999: 69)

Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang harus berbasis sekolah sebagai institusi paling depan dalam kegiatan pendidikan.

2. Prinsip-prinsip Mutu Pendidikan

Mutu merupakan topik penting dalam diskusi tentang pendidikan sekarang ini. Dalam diskusi tersebut dapat muncul berbagai pendapat tentang mutu, mutu menciptakan lingkungan bagi pendidik, orang tua, pejabat pemerintah, wakiil-wakil masyarakat dan

pemuka bisnis untuk bekerja bersama guna memberikan kepada para siswa sumber-sumber daya yang di butuhkan untuk memenuhi tantangan masyarakat, bisnis dan akademik sekarang dan masa depan.(Jerome S. Arcoro, 2007:76:77)

3. Ciri-ciri Mutu Pendidikan

Ciri-ciri mutu (sebagai bentuk pelayanan pelanggan) ditandai dengan: (a) ketepatan waktu pelayanan, (b) akurasi pelayanan, (c) kesopanan dan keramahan (unsur menyenangkan pelanggan), (d) bertanggung jawab atas segala keluhan *complain* pelanggan, (e) kelengkapan pelayanan, (f) kemudahan mendapatkan pelayanan, (g) variasi layanan, (h) pelayanan pribadi, (i) kenyamanan, (j) dan ketersediaan atribut pendukung (Slamet, 1999: 23).

4. Sifat-sifat Mutu Pendidikan

Adapun sifat-sifat pokok mutu jasa, menurut Slamet (1999:25) adalah mengandung unsur-unsur: (1) keterpercayaan (reliability), (2) keterjaminan (assurance), (3) penampilan (tangibility), (4) perhatian (emphaty), dan (5) ketanggapan (responsiveness).

Keterpercayaan dapat dihasilkan dari sikap dan tindakan seperti: jujur, tepat waktu pelayanan, terjaminnya rasa aman dengan produk/jasa yang dipergunakan/diperoleh, dan ketersediaan produk/jasa saat dibutuhkan pelanggan.

Keterjaminan suatu mutu jasa dapat ditimbulkan oleh kondisi misalnya penghasil produk/jasa memang kompeten dalam bidangnya, obyektif dalam pelayanannya, tampil dengan percaya diri dan meyakinkan pelanggannya.

Penampilan adalah sosok dari produk/jasa dan hasil karyanya. Misalnya bersih, sehat, teratur dan rapi, enak dipandang, serasi, berpakaian rapi dan harmonis, dan buaatannya baik.

Empati adalah berusaha merasakan apa yang dialami oleh pelanggan (seandainya saya dia) Cara berempati dapat dinyatakan dengan penuh perhatian terhadap pelanggan, melayani dengan ramah dan memuaskan, memahami keinginan pelanggan, berkomunikasi dengan baik dan benar, dan bersikap penuh simpati.

Adapun ketanggapan adalah ungkapan cepat tanggap dan perhatian terhadap keluhan pelanggan. Ungkapan tersebut dapat dinyatakan dengan cepat memberi respon pada permintaan pelanggan dan cepat memperhatikan dan mengatasi keluhan pelanggan.

Dalam kerangka manajemen pengembangan mutu terpadu, usaha pendidikan tidak lain adalah merupakan usaha jasa yang memberikan pelayanan kepada pelanggannya yang utamanya yaitu kepada mereka yang belajar dalam lembaga pendidikan tersebut.

5. Penggunaan Mutu Pendidikan

Para pelanggan layanan pendidikan dapat terdiri dari berbagai unsur paling tidak empat kelompok (Sallis,1993). Mereka itu adalah *pertama* yang belajar, bisa merupakan mahasiswa/pelajar/murid/peserta belajar yang biasa disebut klien/pelanggan primer (*primary external customers*). Mereka inilah yang langsung menerima manfaat layanan pendidikan dari lembaga tersebut. *Kedua*, para klien terkait dengan orang yang mengirimnya ke lembaga pendidikan, yaitu orang tua atau lembaga tempat klien tersebut bekerja, dan mereka ini kita sebut sebagai pelanggan sekunder (*secondary external customers*). Pelanggan lainnya yang *ketiga* bersifat tersier adalah lapangan kerja, bisa pemerintah maupun masyarakat pengguna output pendidikan (*tertiary external customers*). Selain itu, yang *keempat*, dalam hubungan kelembagaan masih terdapat pelanggan lainnya yaitu yang berasal dari intern lembaga; mereka itu adalah para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi lembaga pendidikan, serta pimpinan lembaga pendidikan (*internal customers*). Walaupun para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi, serta pimpinan lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam proses pelayanan jasa, tetapi mereka termasuk juga pelanggan jika dilihat dari hubungan manajemen. Mereka berkepentingan dengan lembaga tersebut untuk maju, karena semakin maju dan berkualitas dari suatu lembaga pendidikan mereka akan diuntungkan, baik kebanggaan maupun financial.

Seperti disebut diatas bahwa program peningkatan mutu harus berorientasi kepada kebutuhan/harapan pelanggan, maka layanan pendidikan suatu lembaga haruslah memperhatikan kebutuhan dan harapan masing-masing pelanggan diatas. Kepuasan dan kebanggaan dari mereka sebagai penerima manfaat layanan pendidikan harus menjadi acuan bagi program peningkatan mutu layanan pendidikan.

6. Tingkat Mutu Pendidikan Pendidikan Tinggi

Baik kualitas maupun model-model perbaikan mengembangkan sistem pandang pendidikan. Mereka memfokuskan pada program sekolah terpadu dan bukan pada komponen-komponen program terpisah didalam program tersebut. Kedua model tersebut memfokuskan pada hasil model-model tersebut mendorong staf dan siswa untuk

mengidentifikasi berbagai ukuran untuk menggambarkan kinerja. pengukuran kinerja merupakan proses yang dilakukan oleh lembaga untuk mengetahui mencapai kinerja yang di gunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan suatu lembaga. proses pengukuran kinerja melalui monitoring dan evaluasi kegiatan monitoring dengan tujuan: (a) Mengetahui tingkat efektivitas program, (b) Mengetahui kesalahan/penyimpangan program sedini mungkin. (Sugeng Listyo Prabowa, 2008:201).

7. Model Pendidikan Tinggi Bermutu

a. Kriteria Pendidikan Bermutu

Kriteria untuk pendidikan bermutu ditandai dengan “pilar mutu” untuk pendidikan, pilar-pilar tersebut merupakan ramuan penting bagi setiap prakarsa mutu yang berhasil. Pilar mutu itu bersifat universal. Dapat diterapkan di setiap organisasi pendidikan mulai dari kegiatan diruang belajar sampai perawatan bangunan, semua itu sama pentingnya.

Mutu harus berasal dari anggota, administrator, mahasiswa dan staf. Dewan pendidikan harus menciptakan paradigma baru pendidikan untuk komunitasnya, pendidikan mesti dinilai atas kontribusinya untuk mengembangkan siswa menjadi warga negara yang bernilai yang dipersiapkan agar lebih baik menghadapi tantangan akademik dan bisnis di masa depan. (Jerome S. Arcoro, 2007 :14-15)

Mutu suatu lembaga pendidikan tinggi dapat diartikan sejauh mana perguruan tinggi tersebut mempunyai makna dari para *stakeholders*-nya, dengan dapat tidaknya menyajikan kinerja (produk), perilaku pengelola yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, etika akademik, agama, dan nilai budaya. Daulat P.Tampubolon, dalam bukunya Perguruan Tinggi Bermutu (2001:123), menegaskan, akuntabilitas atau mutu perguruan tinggi dapat dilihat yaitu:

“(a) apakah peraturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dapat dipertanggung jawabkan secara undang-undang? (b) apakah materi kuliah yang diberikan dosen dapat dipertanggung-jawabkan secara kurikuler dan etika akademik?, (c) apakah nilai hasil ujian (IP/IPK) yang diperoleh mahasiswa terpercaya?, (d) Apakah perilaku (sikap) pelayanan para pengelola perguruan tinggi dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, etika, agama, dan nilai budaya?, (e) apakah penelitian yang dilakukan dan hasilnya tidak bertentangan dengan agama dan atau undang-undang?, serta (f) apakah perguruan tinggi mempunyai kode etik?”

Mutu secara umum dapat diartikan sebagai derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja baik berupa barang atau jasa. Menurut Sallis (1993), terdapat tiga pengertian konsep mutu. Pertama, mutu sebagai konsep yang absolut (mutlak), kedua, mutu dalam konsep yang relatif, dan ketiga mutu menurut pelanggan. Dalam pengertian absolut, sesuatu disebut bermutu jika memenuhi standar yang tertinggi dan tidak dapat diungguli, sehingga mutu dianggap sesuatu yang ideal yang tidak dapat dikompromikan, seperti kebaikan, keindahan, kebenaran. Mutu dalam konsep ini menunjukkan keunggulan status dan posisi dengan mutu tinggi (high quality). Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka konsep mutu *absolut* bersifat elit karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang dapat memberikan pendidikan dengan *high quality* kepada siswa, dan sebagian besar siswa tidak dapat menjangkaunya. Mutu dalam pendidikan dapat ditinjau dari aspek input, proses, output dan dampak serta manfaat. Dengan kata lain mutu atau kualitas program studi, adalah kemampuan program Studi/Jurusan untuk menunjukkan dan atau memperoleh kepercayaan masyarakat dan pemerintah dengan pernyataan jaminan kualitas atau mutu (quality assurance), pengendalian mutu (quality control), dan perbaikan mutu (quqlity impropmnt). Jaminan, pengendalian, dan pembinaan atau perbaikan mutu, dengan mendapat legitimasi formal dari BAN-PT. *quality assurance, quality control, quqlity impropmnt*. Sedangkan kegiatannya dalam hal: (1) Rencana Induk Pengembangan (RIP), (2) Rencana Strategis, (3) Kurikulum, (4) Tenaga kependidikan, (5) Calon mahasiswa, (6) Sarana dan prasarana yang meliputi: (Ruang kuliah, Ruang dosen, Ruang seminar, Laboratorium, Perpustakaan, Fasilitas komputasi, Fasilitas teknologi informasi, Perlengkapan pendukung pembelajaran, Perlengkapan pendukung kegiatan kemahasiswaan, Peralatan laboratorium, Buku-buku dan dokumen pendukung), (7) Penyelenggaraan pendidikan yang meliputi: (Kuliah, Praktikum, Kegiatan terencana, Pembimbingan, dan Penilaian hasil belajar), (8) Penyelenggaraan penelitian, (9) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, (10) Kerjasama, meliputi: (Tukar menukar sumber daya, Kemahasiswaan, Penelitian, Pengembangan, dan penyelenggaraan program akademik (11) Administrasi dan pendanaan program, meliputi: (Ketertiban administrasi, dan Pendanaan), dan (12) Pelaporan kegiatan proses penyelenggaraan program studi).

Dengan demikian idealnya Jurusan/program studi yang bermutu adalah, Jurusan/program studi yang memiliki kemampuan membuktikan mutu yang tinggi yang dapat didukung oleh akuntabilitas yang tinggi melalui progran studinya yang memperoleh

kepercayaan masyarakat dengan pernyataan jaminan kualitas atau mutu (quality assurance), pengendalian mutu (quality control), dan perbaikan mutu (quality improvement). Jaminan, pengendalian, dan pembinaan atau perbaikan mutu itu hanya dapat diberikan kepada perguruan tinggi atau program studi setelah kepadanya dilakukan evaluasi yang cermat melalui proses akreditasi secara nasional dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN-PT).

b. Mengimplementasikan Mutu di Ruang Belajar

Untuk merubah dari kelas yang terpusat pada guru menjadi kelas yang terpusat pada belajar, cobalah secara mendalam mengkaji kelas yang anda ajar:

- 1) Apakah bangku-bangkunya ter susun seperti garis lurus?
- 2) Apakah meja anda berada di depan kelas?
- 3) Apakah anda sering duduk di kelas anda?
- 4) Apakah anda menerangkan di podium depan kelas?
- 5) Apakah bahan pelajaran hanya dapat didapat oleh anda?
- 6) Apakah memenuhi tuntutan kurikulum merupakan tujuan penting?
- 7) Apakah siswa sering mengeluh karena jenuh?

Apabila jawaban anda ya untuk semua pertanyaan tersebut anda termasuk dosen yang mengajar dengan kegiatan belajar-mengajar berpusat pada dosen di kelas. (Jerome S. Arcoro, 2007: 47-48)

Dalam hal ini anda harus dapat mengubah kelas anda dari kelas yang terfokus pada guru menjadi kelas yang terfokus pada siswa, anda akan mendapatkan pengetahuan secara tidak langsung yang diperlukan untuk mengimplementasikan mutu di kelas.

c. Sumber Belajar atau Media

Sumber belajar atau media adalah komponen komunikasi yang berfungsi sebagai perantara atau pembawa pesan dari pengirim ke penerima. Kata media berasal dari bhs latin *medius* yang secara harfiah berarti “tengah, perantara, pengantar” dalam bahasa arab media adalah perantara “*wasailu*” atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Gerlach & Ely mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, kemampuan atau sikap, dalam hal ini guru, buku dan lingkungan merupakan media. (Ashar Arsyad, 2009:3)

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan bahan pelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.

Media pembelajaran adalah sebagai komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi, dan demikian pula tanpa media pembelajaran proses pembelajaran juga tidak akan berlangsung. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran.

Program studi/Jurusan ideal yang di harapkan di masa depan adalah Program Studi/Jurusan yang memenuhi standar isi mencakup materi dan tingkat kompetensi meliputi kerangka dasar struktur kurikulum dan peningkatan mutu di Program Studi/Jurusan itu sendiri. Program Studi/Jurusan masa depan hendaknya selalu menjadikan kerangka dasar serta struktur kurikulum sebagai pedoman. (Khaerudin, Mahfud junaidi Dkk, 2007: 15)

B. Tinjauan Strategi Akselerasi Peningkatan Mutu Program Studi/Jurusan

1. Konsep Strategi Akselerasi

Strategi dikenal dalam dunia manajemen adalah alat atau cara untuk mencapai keunggulan. Porter (1985) menjelaskan bahwa strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Adrew (1980) mengatakan bahwa strategi adalah kekuatan motivasi untuk *stakeholders*, seperti *stakeholders*, *debtholders*, manajer, karyawan, konsumen, kontinuitas, pemerintah, dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan perusahaan. Argyris et. al. (1985) mengatakan bahwa strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Hamel & Prahalad (1995) mengatakan strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Pengertian lain strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Akselerasi pada mulanya dikenal di dunia fisika *acceleration*. Secara konseptual pengertian *acceleration* suatu kemajuan, atau percepatan atau perubahan kecepatan setiap waktu. Akselerasi menurut Pressy (Hawadi, 2004) adalah "kemajuan yang diperoleh dalam program pada waktu yang lebih cepat". Sedangkan pengertian akselerator, adalah alat pemercepat partikel *subatomic* agar mempunyai energy yang sangat besar untuk menimbulkan transmudasi inti yang dikehendaki. Alat pengukurnya disebut akselerometer yang bekerja berdasarkan hukum kedua Newton ($F=m.a$) termasuk akselerator antara lain siklotron, betatron, generator van de graff, dan sinkrotron. yang diperoleh dalam program.

Yang dimaksud dengan Strategi Akselerasi dalam penelitian ini adalah serangkaian cara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Jurusan di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam melaksanakan tugas fungsinya dalam pengembangan jurusan.

2. Prespektif Jurusan/Program Studi

Program Studi/Jurusan dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu, Program Studi/Jurusan dalam pendekatan sistem dan Program Studi/Jurusan dalam pendekatan aktor. Dalam pendekatan Program Studi/Jurusan sebagai sebuah sistem, maka Program Studi/Jurusan akan dilihat dari sudut lembaga atau organisasional. Artinya, Program Studi/Jurusan akan dilihat dalam bentuk organisasi yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pendekatan aktor, Program Studi/Jurusan akan dilihat dari seluruh stakeholder yang tergabung dalam sekolah. *Stakeholders* Program Studi/Jurusan meliputi pimpinan Program Studi/Jurusan, masyarakat, pegawai, dan mahasiswa. Kelompok masyarakat dibatasi dalam ruang lingkup orangtua mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IKOMAH).

Pendidikan sebagai sebuah proses dari sistem tentunya memiliki komponen-komponen yang saling mempengaruhi. Selanjutnya E. Mulyasa (2009:46) menjelaskan bahwa komponen utama dari pendekatan sistem memiliki tiga komponen, yakni input, proses, dan output, bila satu komponen tersebut tidak berfungsi maka akan mempengaruhi komponen-komponen lainnya. Oleh karena itu, semua komponen dari sistem pendidikan itu harus baik, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang baik dari proses pendidikan.

Program Studi/Jurusan sebagai sistem pendidikan memiliki komponen-komponen yang akan mempengaruhi mutu lulusan-lulusannya, diantara komponen-komponen

tersebut yaitu; *Pertama input* mencakup; 1) harapan; visi, misi, tujuan, sasaran, 2) sumber daya: Manusia, (ketua jurusan, dosen, karyawan, dan tenaga lainnya). Non-manusia (dana, peralatan, perlengkapan, bahan), 3) manajemen; Organisasi, tugas, mekanisme, rencana, program, peraturan, dan pengendalian. *Kadua* proses yakni; 1) pembuatan keputusan, 2) pengelolaan kelembagaan, 3) pengelolaan program, 4) proses belajar mengajar, 5) evaluasi program. *Ketiga* output yakni; hasil nyata pelaksanaan PBM yakni *Academic achievement* misalnya (1) IPK (nilai ujian akhir/indek prestasi (IP). Indek prestasi kumulatif (IPK), (5) lomba karya tulis, lomba Iptek. *Non-Academic Achievement*: misalnya (a) prestasi olahraga, (b) prestasi kesenian, (c) hasil ketrampilan, dsb. *Keempat Out come* yakni; hasil jangka panjang; dampak jangka panjang terhadap individu, sosial, sikap, kinerja, semangat, sistem, penghasilan, pengembangan karir, kesempatan untuk berkembang, dan mutu pada umumnya. Hendyat Soetopo, (2007:60-61)

3. Manajemen Peningkatan Mutu Jurusan/Program Studi

Kajian teori ini agar lebih dipahami secara komprehensif, maka pembahasannya difokuskan pada tiga komponen utama yaitu: (1) konsep dasar manajemen peningkatan mutu, (2) penyusunan sasaran mutu pendidikan, (3) manajemen peningkatan mutu pendidikan, (4) monitoring dan evaluasi peningkatan mutu pendidikan.

a. Konsep Dasar Manajemen Peningkatan Mutu Program Studi/Jurusan

1) Pendekatan-pendekatan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Upaya peningkatan mutu yang dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan harus memiliki teknik atau cara yang ampuh guna dijadikan pedoman pelaksanaan agar hasilnya tercapai dengan baik. Teknik tersebut adalah model pendekatan dalam meningkatkan mutu pendidikan pada tersebut. Ada beberapa model pendekatan, model ini sudah diperkenalkan dan dikembangkan dalam dunia pendidikan oleh beberapa negara misalnya, Sidney Australia yang dipadukan dengan model yang dikembangkan di Pittsburg, Amerika Serikat oleh Donald Adams, dkk. Diantara model dimaksud adalah *school review*, *benchmarking*, *quality assurance*, dan *quality control*. keempat teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut; (Hendiyat Seotopo, 1987:131).

a) School review

Model ini merupakan sebuah proses yang merupakan seluruh komponen pendidikan bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi efektifitas pendidikan, serta mutu lulusan. *School review* dilakukan untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) apakah yang dicapai pendidikan sesuai dengan harapan orang tua siswa dan siswa sendiri? (2) bagaimana prestasi yang telah dicapai para peserta didik? (3) faktor apa yang menghambat upaya untuk meningkatkan mutu? (4) apakah faktor-faktor pendukung yang dimiliki ?.

b) *Benchmarking*

Pendekatan ini merupakan salah satu kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. *Benchmarking* dapat dipastikan untuk individu, kelompok ataupun lembaga. Standar dapat ditentukan berdasarkan keadaan realitas yang ada, misalnya prestasi yang diraih siswa yang baik prilakunya dan yang sedikit nakal namun cerdas (*internal benchmarking*), maupun membandingkan standar kualitas dari pendidikan lain yang lebih baik (*external benchmarking*). Tiga pertanyaan mendasar yang akan dijawab oleh *benchmarking* ini diantaranya; (1) seberapa besar kondisi kita? (2) harus menjadi seberapa baik? (3) bagaimana cara untuk mencapai yang baik tersebut.?

Sedangkan langkah-langkah yang dilaksanakan adalah menentukan fokus, menentukan aspek, variabel atau indikator, menentukan standar, menentukan gap (kesenjangan) yang terjadi, membandingkan standar dengan kondisi kita, merencanakan target untuk mencapai standar, merumuskan sasaran-sasaran program untuk mencapai target.

c) *Quality assurance*

Quality assurance merupakan suatu teknik untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana rencana awal dan yang seharusnya. Dengan teknik ini akan dapat dideteksi adanya deviasi (penyimpangan) yang terjadi pada proses. Teknik ini menekankan pada proses *monitoring* yang berkesinambungan dan melembaga, yang menjadi subsistem pendidikan.

Untuk melaksanakan *quality assurance*, maka lembaga pendidikan harus menekankan pada kualitas hasil belajar, hasil kerja siswa yang dimonitoring secara terus menerus. Informasi dari lembaga dikumpulkan dan dianalisis untuk memperbaiki proses yang berjalan, dan semua pihak dari mulai pimpinan, guru, pegawai administrasi, dan juga orang tua siswa harus memiliki komitmen untuk bersama-sama mengevaluasi kondisi pendidikan yang kritis dan berupaya untuk memperbaikinya.

d) *Quality control*

Quality control adalah suatu sistem yang mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas *ouput* yang tidak sesuai dengan standar. Oleh sebab itu *quality control* memerlukan indikator kualitas yang jelas dan pasti. Berdasarkan tipologi pendidikan yang ada sehingga dapat ditentukan standar penyimpangan kualitas yang terjadi. Standar kualitas ini bersifat relatif dan dapat dicapai oleh setiap pendidikan . Standar kualitas digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui maju mundurnya pendidikan .

Model pendekatan di atas tidak hanya dapat diaplikasikan pada pendidikan lembaga saja, namun sangat memungkinkan dilakukan pada sub-sub komponen manajemen dalam rangka penjaminan mutu dan kualitas output/keluaran pendidikan yang ditekuni guna mewujudkan mutu pendidikan secara *holistik*.

2) Pengertian Manajemen Peningkatan Mutu

Manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreatifitas lembaga pendidikan. Konsep ini diperkenalkan oleh teori *effektive school* yang memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan (Edmon, 1979:25). Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini antara lain: (1) lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan tertib, (2) pendidikan memiliki visi misi dan target mutu yang ingin dicapai, (3) lembaga pendidikan memiliki menejerial yang kuat, (4) adanya harapan yang tinggi dari personal lembaga pendidikan, (5) adanya pengembangan lembaga pendidikan yang terus menerus sesuai dengan tuntutan kebutuhan IPTEK, (6) adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan adminitrasi serta pemanfaatan hasil untuk perbaikan mutu, (7) adanya komunikasi dan dukungan dari orangtua dan masyarakat. (Rusman, 1997: 553)

Sedangkan dalam tahap pelaksanaannya sudah barang tentu, pendidikan akan melaksanakan proses manajemen, yang dikenal dengan (*POAC*) *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/pelaksanaan, dan pengawasan, semua itu merupakan langkah-langkah atau proses manajemen yang harus dilakukan oleh pendidikan . (Suparlan, 2008: 28)

Manajemen peningkatan mutu pendidikan dapat dipahami sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada lembaga pendidikan,

memberikan fleksibilitas/keluwesannya kepada lembaga pendidikan dan mendorong partisipasi warga secara langsung (pimpinan, dosen, mahasiswa, karyawan) dan masyarakat (orang tua mahasiswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, dan pengusaha) untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 13)

Sedangkan dalam upaya-upaya peningkatan mutu, Hendiyat soetop, (1997: 130): memaknai sebagai berikut: (1) pengendalian proses yang berlangsung di pendidikan baik kurikuler maupun administrasi; (2) pelibatan proses diagnosa dan proses tindakan untuk menindak lanjuti diagnosa; (3) memerlukan partisipasi semua pihak (pimpinan, dosen, mahasiswa, karyawan), orangtua mahasiswa, dan para pakar pendidikan).

Tentu saja dalam pelibatan warga dalam penyelenggaraan pendidikan (jurusan/program studi) harus mempertimbangkan kualitas, batas kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan partisipasi. Peningkatan partisipasi warga pendidikan akan mampu menciptakan keterbukaan, kerja sama yang kuat, akuntabilitas, dan demokrasi pendidikan. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dalam program dan keuangan. Kerja sama yang dimaksud adalah adanya sikap dan perbuatan lahiriyah kebersamaan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kerja sama yang baik ditunjukkan oleh hubungan antar warga jurusan/program studi yang erat, dan adanya kesadaran bersama bahwa *output* jurusan/program studi merupakan hasil kolektif *team work* yang kuat dan cerdas. Sedangkan akuntabilitas lembaga pendidikan adalah pertanggungjawaban lembaga pendidikan kepada warga pendidikan, masyarakat dan pemerintah melalui pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka. Sedangkan demokrasi pendidikan adalah kebebasan yang terlembagakan melalui musyawarah dan mufakat dengan menghargai perbedaan, hak asasi manusia serta kewajibannya dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan. (Dirjen Dikdasmen, 2005: 12).

Bertolak dari pengertian manajemen mutu pendidikan maka dapat dipahami bahwa manajemen peningkatan mutu jurusan/program studi adalah manajemen yang menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, fleksibilitas yang seluas-luasnya kepada pendidikan, serta mendorong partisipasi aktif warga jurusan/program (dosen, ketua jurusan, staf, dan mahasiswa) dan warga masyarakat (orangtua mahasiswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, dan pengusaha) untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. Sedangkan dalam pelaksanaannya sudah barang tentu, jurusan/program studi akan

melaksanakan proses manajemen, yang dikenal dengan (*POAC*) *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/pelaksanaan, dan pengawasan, semua itu merupakan langkah-langkah atau proses manajemen yang harus dilakukan oleh pendidikan . (Suparlan, 2008: 28)

3) Tujuan dan manfaat Manajemen dalam Peningkatan Mutu Jurusan/Program Studi.

Manajemen peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk memperdayakan lembaga pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada lembaga pendidikan untuk mengelola sumberdaya lembaga pendidikan, dan mendorong partisipasi warga pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Secara rinci manajemen peningkatan mutu lembaga pendidikan bertujuan untuk; (1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif lembaga pendidikan dalam mengelola, memanfaatkan, dan memperdayakan sumberdaya yang tersedia; (2) Meningkatkan kepedulian warga lembaga pendidikan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pembinaan keputusan bersama; (3) Meningkatkan tanggung jawab pendidikan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu pendidikan; dan (4) Meningkatkan kompetensi yang sehat antara lembaga pendidikan tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:3).

Dilihat dari konteks pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan dan manfaat diterapkan Manajemen Peningkatan Mutu Jurusan/Program Studi adalah diberikan kesempatan kepada warga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum, para warga pendidikan (khususnya para guru) terdorong untuk *berimprovisasi*, dan *inovasi*, serta melakukan berbagai eksperimen di lingkungan Jurusan/Program Studi. Bersamaan dengan itu, manajemen peningkatan mutu berbasis Jurusan/Program Studi lebih mendorong profesionalisme warga pendidikan (para guru dan pendidikan pendidikan), dan akan terlihat rasa tanggap warga pendidikan terhadap kebutuhan setempat lebih meningkat, dan menjamin layanan pendidikan yang dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orang tua, karena orang tua atau warga masyarakat dapat merasakan langsung mengawasi kegiatan belajar anaknya.

b. Implementasi Manajemen dalam Peningkatan Mutu Jurusan/ Program Studi.

1) *Penyusunan sasaran Pengembangan Jurusan/Program Studi.*

Penyusunan sasaran pengembangan mutu pendidikan perlu melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), seperti dosen, mahasiswa, tatausaha/karyawan, orangtua siswa, fakultas, dan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian ketua jurusan, sehingga akan menjadi milik semua warga jurusan dengan kemampuan masing-masing, artinya setiap orang dilibatkan sesuai dengan kemampuan dan kepentingannya. Yang perlu dijaga adalah rasa terwakili dalam proses penyusunan dan rasa memiliki terhadap hasil. Seluruh warga jurusan harus merasa ikut menentukan dalam proses penyusunan sasaran mutu sehingga merasa ikut memiliki dan akhirnya wajib untuk melaksanakannya.

Rencana kerja jurusan (RKJ) disusun bersama oleh jurusan dan komite pendidikan. Kebutuhan jurusan dan aspirasi masyarakat menjadi dasar utama penyusunan RKJ. Dengan kata lain, RKJ bertujuan untuk mengemukakan apa yang diperlukan pendidikan serta harapan masyarakat terhadap pendidikan. Dengan demikian, rencana kerja pendidikan berdasarkan dua jenis masukan, yaitu; (1) keterangan lengkap mengenai keadaan pendidikan; (2) pandangan atau aspirasi masyarakat dan pengguna jasa atau pandangan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). (Muhaimin, dkk, 2009 :200)

Mencermati pernyataan Muhaimin, dkk tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya rencana yang jelas, semua pihak yang berkepentingan orangtua, dosen, pegawai, komite, warga di sekitar jurusan, pendidikan jurusan sendiri akan mengetahui; apa yang dibutuhkan oleh jurusan, apa yang perlu dilakukan selama beberapa tahun yang akan datang. Dalam perencanaan harus jelas serial kegiatan, seperti identifikasi, pembahasan, seleksi, dan prioritas kebutuhan atau yang disebut dengan analisis kebutuhan.

Perencanaan kerja lembaga pendidikan merupakan gambaran masa depan dari sosok intitusi lembaga pendidikan yang dikehendaki oleh warganya. Setiap jurusan harus mempunyai rencana pengembangan. Rencana pengembangan lembaga pendidikan merupakan rencana yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang ada dan yang mungkin diperoleh guna mencapai tujuan yang ingin dicapai di masa datang. Dalam perencanaan peningkatan mutu pendidikan harus memfokus dan memandu prestasi siswa dan etos pembelajaran dari staf pada tingkat unitnya. (Sudarwan Danim, 2006: 109). Lembaga pendidikan yang melaksanakan

manajemen pengembangan pendidikan harus membuat rencana pengembangan jurusan. Rencana pengembangan pendidikan pada umumnya mencakup rumusan Visi, misi, tujuan lembaga pendidikan dan strategi pelaksanaannya. Sedangkan rencana kerja tahunan lembaga pendidikan pada umumnya meliputi peng-identifikasi sasaran jurusan (tujuan situasional jurusan), pemilihan fungsi-fungsi jurusan yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah diidentifikasi, analisis *SWOT*, langkah-langkah pemecahan persoalan, dan penyusunan rencana dan program kerja tahunan jurusan. (Diknas, 2009:32).

Indikasi dari permasalahan tersebut di atas jika dikaji secara mendalam tentunya jurusan/program studi secara serius memikirkan tantangan masa depan dengan merumuskan visi dan misi yang jelas, tujuan pendidikan yang pasti dan target-target atau sasaran-sasaran kelembagaan yang operasional dan dijangkau pelaksanaannya oleh para pengelola dan pelaksana lembaga (jurusan). dengan demikian visi merupakan gambaran masa depan yang diinginkan oleh pendidikan , agar jurusan/program studi yang bersangkutan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Misi adalah tindakan untuk mewujudkan/merealisasikan visi tersebut. Tujuan merupakan "apa" yang akan dicapai/dihasilkan oleh pendidikan yang bersangkutan dan "kapan" tujuan akan dicapai. Jika visi, misi terkait dengan jangka waktu yang panjang, maka tujuan dikaitkan dengan jangka waktu 3-5 tahun. (Depdiknas 2007:33).

Antisipasi terhadap pernyataan tersebut, tidak ada jalan lain untuk Perumusan sasaran pengembangan jurusan/program studi, kecuali merumuskan visi, misi, hal penting lainnya adalah memformulasikan tujuan dan sasaran jurusan/program studi dalam pencapaian program-program yang menjadi prioritas sasaran yang mengarah kepada pelayanan pendidikan yang bermutu. Setelah tujuan pendidikan (tujuan jangka menengah) dirumuskan, maka langkah selanjutnya menetapkan sasaran.

Di pihak lain, Sugeng Listyo Brabowo berpendapat bahwa, teknik penulisan tujuan dan sasaran harus dinyatakan dalam kalimat yang disusun dengan menggunakan metode SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Responsible, Time frame*). SMART artinya bahwa rumusan kalimat tujuan dan sasaran secara jelas terhadap suatu tujuan dan sasaran tertentu. *Measurable* mengandung arti pernyataan tujuan dan sasaran harus mampu diukur, *attainable* bahwa pernyataan tujuan dan sasaran mampu untuk dicapai berdasarkan sumberdaya yang tersedia, *responsible* adalah pernyataan dalam tujuan dan sasaran

memiliki tanggung jawab, dan *time frame* mengandung arti yakni tujuan dan sasaran harus memiliki kerangka waktu pencapaian.(Sugen ListyoPrabowo, 2008:189-190) .

Mencermati pernyataan di atas, maka penyusunan sasaran pengembangan jurusan/program studi perlu memperhatikan langkah-langkah pemecahan persoalan sesuai dengan kondisi riil yang dihadapi jurusan/program studi. Sebagaimana halnya Hendyat Seotopo (2007:75-76) memberikan pandangan bahwa sasaran ini disusun berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi oleh lembaga pendidikan. Tantangan nyata dapat diperoleh membandingkan tujuan yang akan dicapai dengan hasil yang dicapai saat ini. Misalnya tujuan meningkatkan rata-rata prestasi belajar mahasiswa menjadi $< 3,5$ sementara rata-rata prestasi belajar yang dicapai saat ini $< 2,5$ maka tantangan 4 tahun mendatang adalah meningkatkan prestasi belajar siswa 1 poin. Peningkatan prestasi 1 poin inilah yang menjadi tantangan jurusan/program studi. Dengan demikian rumusan target 1 tahun mendatang adalah rata-rata pencapaian nilai prestasi siswa nilai naik 0,25 dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan demikian, maka dalam merumuskan sasaran pengembangan jurusan/program studi harus fokus pada peningkatan, baik peningkatan kualitas, efektivitas, produktivitas, maupun efisiensi. Agar sasaran dapat dicapai dengan efektif, maka sasaran harus dibuat spesifik, terukur, jelas kriterianya, dan disertai indikator yang rinci (SMART). Meskipun sasaran bersumber dari tujuan, namun dalam penentuan sasaran yang mana dan berapa besar kecilnya sasaran, tetap harus didasarkan atas tantangan nyata yang dihadapi oleh jurusan/program studi.

2) *Perencanaan Peningkatan Mutu Pendidikan*

Siswanto (2005:24) mengartikan perencanaan sebagai “aktifitas untuk memilih dan menghubungkan fakta serta aktivitas membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktivitas yang direncanakan”. Dalam teori lain perencanaan adalah:

Menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, dengan demikian diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang (Terry, 2003:17).

Sondang P.Siagian (Afifudin, 2007:5) mengartikan perencanaan sebagai “keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang terhadap hal-hal yang akan

dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Pridata (1988:34) membedakan antara konsep perencanaan secara tradisional dengan partisipatori yang dapat dijadikan panduan oleh pengelola program dalam menyusun rencana program. Kedua konsep rencana itu mengandung keunggulan dan kelemahan tertentu seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 1.1 Perbedaan Perencanaan Perencanaan Tradisional dan Perencanaan Partisipatori

No.	Perencanaan Tradisional	Perencanaan Partisipatori
1.	Perencanaan Pendidikan di bawah arahan ekonomi	Perencanaan terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan secara menyeluruh
2.	Penilaian kuantitatif pada input-output sebagai tenaga kerja	Penilaian pada program dan tujuan system pendidikan
3.	Perencanaan tingkat nasional	Perencanaan desentralisasi

Dari beberapa uraian di atas, nampak bahwa perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan manajemen. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan fungsi perencanaan merupakan kegiatan awal sebagai pengakuan bahwa suatu pekerjaan tidak semata-mata ditentukan sendiri keberhasilannya, namun banyak factor lain yang harus dipersiapkan untuk mendukung keberhasilannya. Memperhatikan penjelasan tersebut, maka program peningkatan mutu pendidikan perlu direncanakan dengan baik agar dalam pelaksanaannya bias mencapai hasil yang optimal, dan pemahaman mengenai pengertian perencanaan dalam hal ini sangat diperlukan.

Salah satu aspek yang juga penting dalam perencanaan adalah pembuatan keputusan (making decision), proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Ada empat tahapan dalam proses perencanaan, yaitu : (a) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, (b) Merumuskan keadaan saat ini, (c) Mengidentifikasi segala peluang dan hambatan, (d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan dalam pencapaian tujuan.

Sedangkan alasan mengapa perencanaan diperlukan yaitu untuk mencapai: (a) "*Protective bennefits*" merupakan hasil dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan.(b) "*Positive benefit*" peningkatan pencapaian tujuan organisasi.

Ada beberapa manfaat Perencanaan antara lain: (a) Membantu manajemen dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan, (b) Perencanaan terkadang cenderung menunda kegiatan, (c) Perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individu dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi.

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk mewujudkan rencana kegiatan yang menjadi tindakan nyata dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tim Dosen MKDK FIP Ikip Bandung (1994:34) menempatkan pelaksanaan kegiatan “merupakan tugas pemimpin yang kedua setelah penyusunan rencana kerja”. Dalam prakteknya pelaksanaan kegiatan merupakan implementasi kebijakan yang dilakukan dengan rangkaian tertentu dengan strategi tertentu serta metode kerja sebagaimana ditetapkan sebelumnya.

3) *Implementasi rencana pengembangan Jurusan/Program Studi*

Implementasi dari tugas fungsi pengembangan jurusan/program studi akan terlaksana, apabila jurusan/program studi diberi kepercayaan untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan p. Pemerintah tinggal membuat standar yang diatur dan disepakati secara nasional sebagai indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu.

Untuk mewujudkan pengembangan mutu jurusan/program studi tersebut, Veithzal Rivai menyatakan bahwa, fungsi-fungsi yang didesentralisasikan meliputi: proses belajar mengajar, perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan kurikulum, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan peralatan dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, pelayanan peserta didik, hubungan lembaga dengan masyarakat, dan pengelolaan iklim pendidikan . (Feithzal Rivai&Sylviyana Murni, 1997:165-168). Sementara E. Mulyasa (2007: 39.), berpendapat, bahwa implementasi rencana pengembangan pendidikan, adalah manajemen terhadap komponen-komponen pendidikan itu sendiri yang mencakup antara lain; 1) kurikulum dan program pengajaran, 2) tenaga kependidikan, 3) kesiswaan, 4) keuangan, 5) sarana/prasarana pendidikan, 6) pengelolaan hubungan pendidikan dan masyarakat, 7) manajemen pelayanan khusus.

Di lain pihak, Ibrahim Bafadhal, (2006: 58) berpendapat bahwa: domain manajemen yang di desentralisasikan mencakup seluruh aspek pengembangan pendidikan antara lain adalah; a) manajemen pembelajaran, b) manajemen kesiswaan, c) manajemen kepegawaian, d) manajemen sarana/prasarana, e) manajemen keuangan, f) manajemen hubungan dengan masyarakat, g) manajemen layanan khusus.

Berkaitan dengan manajemen pengembangan Jurusan/program studi tidak terlepas dari pengembangan misi tridharma pendidikan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan strategi peningkatan mutu Jurusan/Prodi-prodi didasarkan pada kajian pemikiran strategis Fakultas Sains dan Teknologi UIN Bandung yang didasarkan pula pada hasil evaluasi tahunan Fakultas, evaluasi diri Universitas dan program strategis Pendidikan Tinggi Nasional yang tertuang dalam naskah HELTS. Beberapa prioritas program strategis yang perlu dilaksanakan dalam mempersiapkan Jurusan/Prodi-prodi yang mandiri dalam lingkungan *Islamic entrepreneurial university*, yaitu (1) Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan status Program Studi, (2) Optimalisasi kelembagaan dan (3) Peningkatan kompetensi human resources secara total. Ketiga program strategis besar tersebut dirinci secara spesifik kedalam 5 bidang yaitu; (1) Organisasi dan Manajemen, (2) Pendidikan dan Kemahasiswaan, (3) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Kerja sama Institusional, dan (5) Bidang Penunjang Penyelenggaraan Jurusan/Program Studi. Maka sebagian urusan-urusan manajemen yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab jurusan/program studi dalam kerangka pengembangan mutu jurusan/program studi dikembangkan melalui : (1) manajemen pendidikan, (2) manajemen penelitian, dan (3) manajemen pengabdian kepada masyarakat.

1) Manajemen Pendidikan Jurusan/Program studi

Manajemen pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, kesiswaan, ketenagaan, sarana, pembiayaan,

(a) Manajemen Kurikulum

Sebelum adanya otonomi pendidikan, pemerintah memiliki otoritas yang sangat kuat dalam penentuan kurikulum, dan hampir tidak ada ruang bagi guru untuk melakukan inovasi-inovasi penyesuaian baik atas pertimbangan psikologi anak, ataupun tuntutan lokal dari daerah di mana lembaga pendidikan berada, sehingga guru tidak memiliki keterlibatan

emosional terhadap kurikulum yang diajarkannya, dan begitu juga lembaga pendidikan yang hanya berada pada subordinasi untuk melaksanakan paket-paket pelajaran yang dirancang dari pusat.

Untuk itu, Wiles-Bondi amat relevan untuk diangkat sebagai salah satu *opsi* pemikiran dalam memberlakukan UU No. 22 Tahun 1999. Dalam teorinya itu Bondi menyebutkan, bahwa pengembangan kurikulum adalah pekerjaan dan usaha bersama-sama. Pengembangan kurikulum harus melibatkan banyak orang, baik dalam lingkungan pendidikan maupun di luar lingkungan pendidikan. Guru yang akan melaksanakan kurikulum akan lebih besar menentukan sukses dan tidaknya perubahan kurikulum. Demikian juga siswa harus menjadi bagian dari proses kurikulum. Komite pendidikan juga harus ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum. (Dede Rosyada, 1997: 77)

Di lain pihak, E. Mulyasa, (2007: 40), menyatakan bahwa Manajemen kurikulum dan program pembelajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum.

Dengan demikian perlu dilakukan pembagian tugas, penyusunan kalender pendidikan, dan jadwal pembelajaran, pembagian waktu yang digunakan, penetapan pelaksanaan evaluasi belajar, penetapan penilaian, penetapan norma kenaikan kelas, pencatatan kemajuan belajar peserta didik, serta peningkatan perbaikan pengajaran serta pengisian waktu jam kosong.

Selain itu Ibrahim Bafadhal, (2006) mengatakan, bahwa manajemen pembelajaran meliputi (1) perencanaan yakni analisis materi pembelajaran (AMP), penyusunan kalender pendidikan, penyusunan program tahunan (prota) dengan memperhatikan kalender pendidikan dan hasil analisis materi pelajaran, penyusunan program caturwulan atau semester berdasarkan program tahunan yang telah disusun, penyusunan program satuan pembelajaran (PSP), penyusunan rencana bimbingan dan penyuluhan. (2) pengorganisasian yakni pembagian tugas mengajar dan tugas lain, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan jadwal kegiatan perbaikan, penyusunan jadwal kegiatan pengayaan, penyusunan jadwal kegiatan ekstra kulikuler, dan penyusunan jadwal kegiatan bimbingan dan penyuluhan. (3) Pengarahan yakni pengaturan pelaksanaan kegiatan pembukaan tahun ajaran baru, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan, supervisi pelaksanaan pembelajaran, supervisi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan. (4) pengawasan yakni supervisi pelaksanaan pembelajaran, supervisi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, evaluasi proses dan hasil kegiatan

pembelajaran, evaluasi proses dan hasil kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Terkait dengan rencana pengembangan mutu jurusan/program studi, maka pelaksanaan kurikulum perlu keterlibatan masyarakat, agar dapat memahami, membantu, dan mengontrol, sehingga pendidikan dituntut kooperatif, dan juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melaksanakan pembelajaran, serta menilai kurikulum.

Kurikulum muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada standar isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan masing-masing daerah lebih meningkatkan relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum muatan lokal mendukung dan melengkapi kurikulum nasional. (Rusman, 2009: 4-5)

Dalam hal ini jurusan/program studi boleh memperkaya apa yang diajarkannya. Artinya apa yang diajarkan boleh diperluas dari yang harus, seharusnya, dan yang dapat diajarkan. Jurusan/program juga boleh memodifikasi kurikulum dan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.

(b) Manajemen kesiswaan/Mahasiswa

Manajemen kesiswaan merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan masalah kesiswaan. Tujuannya adalah menata proses mulai dari perekrutan, mengikuti pembelajaran sampai dengan lulus sesuai dengan tujuan institusional agar dapat berlangsung secara efektif. Kegiatan manajemen kesiswaan meliputi; a) perencanaan penerimaan siswa baru, b) pembinaan siswa, c) kelulusan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan dalam penerimaan siswa baru, Rohiyat menawarkan beberapa konsep, antara lain yaitu; 1) penetapan daya tampung (formasi), 2) penetapan persyaratan siswa yang akan diterima, 3) pembentukan panitia penerimaan siswa baru. (Rohiyat, 2009, :25).

Statemen di atas harus dimaknai bahwa manajemen kesiswaan yang menyangkut layanan siswa; mulai dari penerimaan siswa baru, pembinaan, pemantapan untuk melanjutkan pendidikan, pengurusan alumni hingga untuk sampai pada memasuki dunia kerja,.

Terkait dengan pembinaan siswa, menyatakan bahwa ada lima hal yang dilakukan dalam pembinaan siswa di antaranya; a) memberikan orientasi kepada siswa siswa baru, b) mencatat kehadiran siswa, c) mencatat prestasi siswa, d) membina disiplin siswa, dan e) membina siswa yang telah tamat belajar. (Rohiyat, 2009: 26).

Ibrahim Bafadhal, (2006:19) mempunyai konsep yang menarik tentang manajemen kesiswaan yang mencakup (1) perencanaan, yakni sensus anak usia prasekolah, perencanaan daya tampungnya, perencanaan penerimaan siswa baru, (2) pengorganisasian, yakni pengelompokan siswa berdasarkan pola tertentu (3) pengarahan, yakni pembinaan disiplin belajar siswa, pencatatan kehadiran siswa, pengaturan perpindahan siswa, dan pengaturan kelulusan siswa, (4) pengawasan yakni pemantauan siswa, penilaian siswa.

Selain itu Sutisna (1985:45) memberikan pandangan bahwa tanggung jawab pimpinan lembaga pendidikan dalam mengelola bidang kesiswaan di antaranya: (1) kehadiran dalam pembelajaran dan masalah-masalah yang berhubungan dengan dengan itu; (2) penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan penunjukan program-program yang akan di berikan; (3) evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar; (4) program supervisi bagi peserta didik yang mempunyai kelainan, seperti pengajaran, perbaikan, dan pengajaran luar biasa; (5) pengendalian disiplin siswa; (6) program bimbingan dan penyuluhan; (7) program kesehatan dan pengamanan; dan (8) penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional.

Ditinjau dari konteks pendidikan nasional, maka manajemen kesiswaan merupakan bagian integral dari kebijakan pendidikan yang sejalan dengan program kurikuler. Program kurikuler para siswa lebih ditekankan kepada kemampuan intelektual dan mengacu pada kemampuan berfikir ilmiah, sistimatis, dan terarah. Program kokurikuler diarahkan agar siswa memahami bahwa ada keterkaitan dengan mata pelajaran yang termasuk dalam kurikuler. Para siswa diarahkan tentang pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, watak, kepribadian bangsa dan bernegara, ketrampilan dan kemandiriannya, olahraga dan kesehatan.

(c) Manajemen kepegawaian

Personalialia dalam konteks lembaga pendidikan (Jurusan/Program Studi) dibatasi dengan sebutan pegawai. personel di jurusan/program studi meliputi unsur dosen (tenaga pengajar) dan unsur karyawan (tenaga adminitrasi) secara lebih terperinci dapat disebutkan keseluruhan personel jurusan, yaitu; ketua jurusan, Sekretris jurusan, dosen, pegawai tata usaha, dan pesuruh atau penjaga pendidikan . Terkait dengan manajemen kepegawaian

Ibrahim Bafadhal (2006:60) berpendapat, bahwa manajemen kepegawaian mencakup perencanaan yakni analisis pekerjaan, penyusunan formasi guru dan pegawai, perencanaan dan pengadaan guru dan pegawai baru. Pengorganisasian mencakup pembagian tugas guru dan pegawai. Pengarahan yakni pembinaan professional guru dan pegawai, pembinaan karir guru dan pegawai, pembinaan kesejahteraan guru dan pegawai, pengaturan pemindahan guru dan pegawai, dan pengaturan pemberhentian guru dan pegawai. Pengawasan meliputi pemantauan kinerja guru dan pegawai, dan penilaian kinerja guru dan pegawai.

Selanjutnya Rohiyat (2009:66) mengatakan bahwa manajemen kepegawaian (pengelolaan ketenagaan) terdiri dari analisis kebutuhan, perencanaan dan rekrutmen, pengembangan, hadiah dan sanksi (*reward and punishment*) hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja (guru, tenaga administrasi, laboran, dsb.) dapat dilakukan oleh lembaga, kecuali yang menyangkut dengan pengupahan/imbal jasa dan rekrutmen guru pegawai negeri, yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.

Bertolak dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, maka manajemen kepegawaian pada jurusan/program studi yang menjadi tanggungjawab ketua jurusan menuntut kemampuan dalam manajemen personalia yang memadai, kerana telah menjadi tuntutan bahwa ketua jurusan harus ikut bertanggungjawab akan keberhasilan atau kegagalan anggota jurusan/program studi dalam menuju pendidikan yang bermutu..

(d) Manajemen sarana/prasarana

Pengelolaan fasilitas yang dilakukan oleh jurusan/program studi termasuk salah satu komponen dasar dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan dan termasuk fungsi yang didesentralisasikan. Mengelola sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya sangat kompleks, namun demikian untuk telaah dapat ditelusuri dari berbagai segi, yaitu dari segi jenis, proses, dan manfaat. Menurut E. Mulyasa (2007:49) bahwa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan khususnya proses belajar mengajar (gedung, ruang kelas, meja kursi, alat-alat dan media pengajaran, laboratorium, studio) adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas yang tidak secara langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran (halaman, kebun, tanaman, jalan) tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar maka komponen tersebut termasuk sarana pendidikan.

Berkaitan dengan manajemen sarana pendidikan Veithzal Rizal, (1999:166) berpendapat, bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalanya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan.

Sementara itu Ibrahim Bafadhal (2006:61-62) berpendapat bahwa manajemen sarana/prasarana mencakup perencanaan yakni, analisis kebutuhan sarana/ prasarana pendidikan , perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana. Pengorganisasian meliputi pendistribusian, penataan sarana/prasarana. Pengarahan menyangkut pemanfaatan sarana/ prasarana secara efektif dan efisien, pemeliharaan sarana/prasarana, inventarisasi sarana/prasarana, dan penghapusan sarana dan prasarana. Pengawasan yakni pemantauan kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana/prasarana, penilaian kinerja sarana dan prasarana.

Di lain pihak Rohiyat (2003:66), mengatakan bahwa Pengelolaan fasilitas sudah seharusnya dilakukan, mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, hingga sampai pengembangan.

Terkait dengan pengembangan jurusan, hal ini didasari oleh kenyataan bahwa jurusan yang lebih mengetahui kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya, terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses pembelajaran di jurusan. Pernyataan atau pendapat di atas mengenai manajemen sarana/prasarana pendidikan, dapat dipahami bahwa kegiatan sarana/prasarana meliputi; 1) perencanaan kebutuhan, b) pengadaan, c) penyimpanan, 4) penginventarisasian, 5) pemeliharaan, dan 6) penghapusan sarana/prasarana pendidikan. Indikasi dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas jika dikaji secara mendalam, tentunya memerlukan upaya yang serius dari ketua jurusan untuk mengelola sarana dan prasarana dengan baik sehingga dapat menciptakan jurusan yang dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan dalam pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan mutu pendidikan.

(e) Manajemen keuangan (pembiayaan)

Manajemen keuangan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana menghimpun dana dan mendistribusikannya sehingga tujuan lembaga dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Kaitan dengan manajemen keuangan, maka Komariah & Cipi Triatna, (2006:56) berpendapat, bahwa keuangan pendidikan meliputi, penggalan sumber-sumber dana pendidikan, pemanfaatan dana dan pertanggungjawabannya manajemen dana pendidikan diawali dengan pembuatan Rencana Biaya pembelajaran yang disusun oleh lembaga pendidikan dengan memanfaatkan dana yang tersedia secara rutin dari pemerintah/lembaga. Kekurangan dana yang dialokasikan (pemerintah) dapat didiskusikan dengan dewan/pimpinan lembaga dan pihak orang tua untuk menutupi kekurangannya.

Selain itu Rusman berpandangan, bahwa Manajemen keuangan pendidikan terutama berkenaan dengan kiat lembaga pendidikan dalam menggali dana, mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan pendidikan, cara mengadminitrasikan dana pendidikan, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan. Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, di samping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional pendidikan, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan, baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, maupun sumber-sumber lainnya. (Rusman, 2006:129)

Mencermati beberapa pandangan di atas memberikan gambaran bahwa Perencanaan keuangan dalam rangka peningkatan mutu berbasis pendidikan mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban. Selanjutnya pengelolaan manajemen keuangan berbasis pendidikan, sedikitnya ada dua kegiatan, yakni penyusunan rencana anggaran, dan pengembangan rencana anggaran belanja (RAPB).

(1) Penyusunan anggaran pembiayaan

Dalam rangka penyusunan anggaran pembiayaan pendidikan atau disebut juga belanja pendidikan (ABP), biasanya dikembangkan dalam format-format yang meliputi: *pertama* sumber pendapatan dan *kedua* pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran, honorarium dan kesejahteraan. Lipham (1985) mengungkapkan empat fase kegiatan penyusunan anggaran diantaranya, *pertama* perencanaan anggaran; yakni kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan dalam bentuk operasional yang bisa diukur, menganalisis komponen-komponen yang mencapai tujuan,

membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran; *kedua* mempersiapkan anggaran; antara lain menyesuaikan kegiatan sesuai mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dengan lengkap, dan bahan-bahan yang telah tersedia; *ketiga* mengelola pelaksanaan anggaran; yakni mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengevaluasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan; *keempat* memilai pelaksanaan anggaran; antara lain menilai pelaksanaan proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang. (Depag. 2004: 82)

(2) Pengembangan Rencana Anggaran Belanja (RAPB)

Pengembangan rencana anggaran belanja pendidikan (RAB) pada umumnya ada tiga langkah, yakni pada tingkat kelompok kerja; pada tingkat kerjasama dengan komite pendidikan; sosialisasi dan legalitas. (Depag, : 83-84) *Pertama* pada tingkat kelompok kerja. Kelompok kerja yang dibentuk oleh lembaga pendidikan, yang terdiri dari para pembantu pimpinan lembaga pendidikan memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, selanjutnya diklasifikasi, dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil identifikasi tersebut kemudian menentukan alokasi mana yang sangat mendesak dan yang tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mendesak dan mengganggu kegiatan pendidikan, khususnya proses pembelajaran maka dapat dilakukan pengurangan biaya dengan dana yang tersedia; *kedua* pada tingkat kerjasama dengan komite pendidikan. Kerjasama antara komite pendidikan dengan kelompok kerja yang telah terbentuk perlu dilakukan untuk mengadakan rapat pengurus dan rapat anggota dalam rangka pengembangan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPB; *ketiga* sosialisasi dan legalitas, setelah RAPB disepakati dengan komite pendidikan selanjutnya di sosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas dan mengajukan usulan RSPB, kepada instansi terkait untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.

Hal yang senada juga dikatakan Ibrahim Bafadal (2006:62), menjelaskan bahwa manajemen keuangan mencakup perencanaan meliputi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja (RAPB). Pengorganisasian yakni pengadaan dan pengalokasian anggaran

berdasarkan RAPB. Pengarahan meliputi pelaksanaan anggaran, pembukuan keuangan, pertanggung jawaban keuangan. Pengawasan meliputi pemantauan keuangan, penilaian kinerja manajemen keuangan.

E. Mulyasa (2007:49) berpendapat bahwa komponen utama dalam manajemen keuangan meliputi; prosedur anggaran, prosedur akuntansi keuangan, pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian, prosedur investasi, dan prosedur pemeriksaan dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator (pejabat yang berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran), ordonator (pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan dan bendaharawan (pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban).

Hal semacam ini didasari pada kenyataan bahwa jurusan yang memahami kebutuhannya, sehingga desentralisasi penggunaan keuangan dalam hal-hal tertentu sudah seharusnya dilimpahkan kepada jurusan. Jurusan perlu diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

(f) Manajemen hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat

Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat merupakan mitra untuk mengembangkan pendidikan. Lembaga pendidikan bisa tidak maju tanpa bantuan dari masyarakat. Oleh karena itu, kemitraan dengan masyarakat harus terus terjalin.

Terkait dengan hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat, Suyanto (2008:83) berpandangan bahwa kontribusi masyarakat di dalam pembangunan pendidikan, tidak hanya menyangkut soal pendanaan pendidikan atau dukungan sarana prasaran pendidikan, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah keterlibatan masyarakat untuk ikut terlibat di dalam formulasi kebijakan maupun pengembangan model-model pendidikan yang lebih mengakar pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan, baik dalam konteks lokal maupun nasional. (Suyanto, 2008:83)

Sementara Ibrahim bafadal (2006:62) berpandangan bahwa manajemen hubungan masyarakat mencakup perencanaan yakni analisis kebutuhan keterlibatan masyarakat

dalam penyelenggaraan pendidikan, menyusun program hubungan dengan masyarakat. Pengorganisasian mencakup pembagian tugas melakukan program hubungan dengan masyarakat. Pengarahan menyangkut menciptakan hubungan dengan orang tua siswa, mendorong orang tua menyediakan lingkungan belajar yang efektif, mengadakan komunikasi dengan tokoh masyarakat, mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dan mengadakan kerja sama dengan organisasi sosial/keagamaan dan sejenisnya.

Di lain pihak Hamzah B. Uno, (2007:92) berpendapat bahwa fungsi komite pendidikan adalah sebagai berikut; (1) *advisory agency* (pemberi pertimbangan), (2) *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), (3) *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan, dan (4) mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah).

Menurut Mulyasa (2002) dalam Veityhzal Rivai, bahwa hubungan pendidikan dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk: (1) memajukan mutu pembelajaran dan pertumbuhan anak, (2) memperkuat tujuan serta meningkatkan mutu penghidupan masyarakat, serta (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan pendidikan .

Untuk merealisasikan kerja sama tersebut, maka humas pada dasarnya tidak hanya bersifat publisitas belaka, namun jauh dari itu bagaimana pendidikan membangun jalinan kerja untuk kondisi sekarang dan yang akan datang merupakan sesuatu yang sangat vital dan penting dilakukan, dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di pendidikan . Hubungan pendidikan dan masyarakat dapat dikatakan sebagai usaha kooperatif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling pengertian antara pendidikan , personil pendidikan , dan anggota masyarakat.

2) Manajemen Penelitian

Penelitian merupakan salahsatu potensi manusia yang sangat luarbiasa, baik, penelitian terhadap dirinya maupun terhadap dunia luar lingkungannya. Berkat kompetensi penelitian tersebut manusia maju dan berkembang di dunia ini, saling mengenal dan saling bertukar pikiran. Berkat kompetensi penelitian ini pula mampu mengenal dirinya bahkan mengenal Sang penciptanya, serta mengenal hak dan kewajibannya. Kompetensi penelitian ini pula yang mampu mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,

seni, dan budaya sehingga manusia bisa menginjakkan kakinya di planet luar angkasa (E. Mulyasa : 2009: 1).

Berkaitan dengan pengembangan mutu suatu lembaga pendidikan tinggi dapat diartikan sejauh mana perguruan tinggi tersebut mempunyai makna dari para *stakeholders*-nya, dengan dapat tidaknya menyajikan kinerja (produk), perilaku pengelola yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, etika akademik, agama, dan nilai budaya. Daulat P.Tampubolon, dalam bukunya Perguruan Tinggi Bermutu (2001:123), menegaskan, akuntabilitas atau mutu perguruan tinggi dapat dilihat yaitu:

“(a) apakah peraturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dapat dipertanggung-jawabkan secara undang-undang? (b) apakah materi kuliah yang diberikan dosen dapat dipertanggung-jawabkan secara kurikuler dan etika akademik?, (c) apakah nilai hasil ujian (IP/IPK) yang diperoleh mahasiswa terpercaya?, (d) Apakah perilaku (sikap) pelayanan para pengelola perguruan tinggi dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, etika, agama, dan nilai budaya?, (e) apakah penelitian yang dilakukan dan hasilnya tidak bertentangan dengan agama dan atau undang-undang?, serta (f) apakah perguruan tinggi mempunyai kode etik?”

Sehubungan dengan dengan pengembangan mutu jurusan/program studi pendidikan tinggi, maka salah satunya berkewajiban mengembangkan penelitian merupakan bagian pokok dari pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Pengembangan penelitian diarahkan pada upaya meningkatnya kualitas penelitian di kalangan civitas akademika dalam rangka membangun transformasi paradigma baru. Dengan sasaran terwujudnya pondasi dan kerangka ilmiah yang tersistematisasikan dalam mencapai indikator dan standar *research university*. Kegiatan penelitian juga lebih diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan dan kualitas penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa baik secara kuantitas maupun kualitas. Indikator *Output*-nya adalah (1) Meningkatnya jumlah penelitian di kalangan civitas akademika, (2) Meningkatnya kualitas hasil penelitian. Indikator *Outcome* –nya adalah (1) Berkembangnya ilmu pengetahuan, (2) dan Terpublikasikan dan termanfaatkannya hasil penelitian.

3) Manajemen Pengabdian kepada masyarakat

Pengabdian juga merupakan kewajiban manusia untuk mengadakan dirinya baik kepada Sang Penciptanya, maupun kepada sesamanya. Pengabdian kepada masyarakat dalam konteks perguruan tinggi merupakan sebagian dari tugas pokok pengembangan tri dharma perguruan tinggi. Pengabdian merupakan satu bentuk pendalaman dan pengalaman pengembangan ilmu dalam realitas sosial dan budaya.

Pengembangan bidang Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan pada upaya peningkatan implementasi ilmu dalam pemberdayaan masyarakat dan kontribusi peningkatan daya saing bangsa, dengan sasaran terwujudnya implementasi ilmu dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa, dengan Indikator *Outputnya* adalah (1) meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kesadaran beragama, (2) meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. *Outcome:* meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Fakultas Sains dan Teknologi.

Manajemen pengembangannya meliputi: (1) penyusunan strategi pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan, (2) penyelenggaraan Kuliah Kerja Pengabdian (KKP) atau Kuliah Kerja Nyata (KKN), (3) optimalisasi peran dan fungsi kampus lingkungan, (5) rintisan pesantren teknologi binaan.

4) Manajemen Penunjang Tridharma

(a) Manajemen Layanan Khusus

Pengelolaan iklim pendidikan (fisik dan non-fisik) yang kondusif merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan pendidikan yang aman dan tertip, optimisme dan harapan yang tinggi dari warga pendidikan, kesehatan warga pendidikan, dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa adalah contoh-contoh iklim pendidikan yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Iklim pendidikan sudah merupakan kewenangan lembaga pendidikan sehingga yang diperlukan adalah upaya-upaya yang lebih intensif dan ekstensif.

Terkait dengan iklim pendidikan, Ibrahim Bafadal (2006:63) berpandangan, bahwa dalam perencanaan iklim lingkungan pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) analisis kebutuhan program layanan khusus bagi warga pendidikan, 2) penyusunan program layanan khusus bagi warga pendidikan, 3) pengorganisasian meliputi pembagian tugas melaksanakan program layanan khusus bagi warga pendidikan, 4) pengarahan mencakup pengaturan pelaksanaan antar jemput siswa, 5) pengaturan pelaksanaan asrama siswa, 6) pengaturan pelaksanaan makan siang siswa, 7) pengaturan pelaksanaan program koperasi pendidikan, dan 8) pengaturan pelaksanaan program layanan khusus lainnya, 9) pengawasan yakni pemantauan program layanan khusus, 10) penilaian kinerja layanan khusus bagi warga pendidikan.

Menurut E. Mulyasa,(2007:52-53) bahwa manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan. Perpustakaan yang lengkap dan

dikelola dengan baik memungkinkan peserta didik lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperolehnya dikelas melalui belajar mandiri baik kampus maupun dirumah. Selain itu manajemen layanan khusus lainnya kesehatan dan keamanan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yaitu, "...manusia yang memiliki kehatan jasmani dan rohani". Untuk kepentingan tersebut, lembaga pendidikan mengembangkan program pendidikan jasmani dan kesehatan pendidikan melalui usaha kesehatan pendidikan (UKS), dan berusaha meningkatkan program pelayanan melalui kerja sama dengan unit-unit dinas kesehatan setempat, disamping itu lembaga pendidikan harus memberikan pelayanan keamanan kepada warganya agar mereka dapat melaksanakan tugas dan belajar dengan tenang dan nyaman.

Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di lingkungan pendidikan dalam rangka untuk mendukung proses belajar mengajar tidak bisa terlepas dari fasilitas lain untuk mencapainya. Keberhasilan belajar tersebut di antaranya harus ditunjang dengan pusat sumber belajar, pusat kesehatan, bimbingan konseling, dan kantin dsb.

(b) Manajemen Sistem Informasi

Program sistem informasi yang dikembangkan mencakup: (a) penyusunan *blue print* pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi termasuk sistem yang mengatur aliran data, otorisasi akses data, dan sistem *disaster recovery*; (b) mengembangkan Sistem Informasi Terpadu, yang mencakup sistem informasi akademik, kepegawaian, administrasi, sarana prasarana, pendanaan, kerjasama, dan lainnya; (c) sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*) yang membantu pimpinan dalam melakukan perencanaan dan analisa evaluasi diri dengan lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih obyektif; (d) penyusunan basis data dan informasi yang mencakup keuangan, aset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, dosen dan tenaga pendukung; (e) sistem jaringan informasi Local Area Network (LAN) yang membangun komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi kampus; (f) pengembangan kapasitas internet dengan rasio *bandwidth* yang memadai bagi seluruh sivitas akademika.

(c) Manajemen Penjaminan mutu

Sistem penjaminan mutu dibangun dan dikembangkan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu juga

difungsikan sebagai bagian dari sistem pengelolaan dan proses pelaksanaan program-program akademik dan non akademik. Sistem penjaminan mutu dibentuk ditingkat universitas. Sistem penjaminan mutu disusun melalui pengorganisasian dan manual mutu yang memuat pernyataan mutu sebagai komitmen institusi, kebijakan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja mutu. Dalam implementasi penjaminan mutu, perlu dilakukan penetapan sasaran mutu yang harus dicapai oleh unit-unit kerja sesuai dengan kapasitas dan kinerja masing-masing, mengembangkan mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan serta mengembangkan sistem penjaminan mutu untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan di tingkat nasional maupun internasional.

Monitoring dan evaluasi terhadap proses peningkatan mutu berkelanjutan dilakukan dengan berkoordinasi dengan pelaksana audit internal, untuk memberi masukan sebagai bahan tindakan perbaikan yang efektif. Untuk keperluan ini pula, perlu dikembangkan sistem rekaman data dan informasi yang baik mengenai proses serta hasil pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Rekaman data dan informasi yang baik dimaksudkan untuk memungkinkan pelacakan kembali data dan informasi yang diperlukan serta memberikan peringatan dini kepada pihak yang melakukan tindakan perbaikan. Hasil-hasil seluruh sistem penjaminan mutu yang terdokumentasikan dengan baik digunakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program penjaminan mutu eksternal termasuk program akreditasi. Indikator *Outputnya* adalah (1) Terwujudnya sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan pada tingkat internal dan eksternal. (2) Terwujudnya akreditasi institusi secara periodic. *Out come:* lembaga pendidikan memiliki jaminan (quality assurance), pengendalian mutu (quality control), dan perbaikan mutu (quqlity impropment).

Program pengembangan Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan mencakup pengembangan : (1) sistem penjaminan mutu yang didukung data-data manual mutu, dan pelaksanaannya; (2) pengadaan dan pengorganisasian manual mutu; (3) implementasi penjaminan mutu; (4) menetapkan sasaran mutu, memonitor dan evaluasi pencapaian mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, SDM, kinerja, administrasi, pendanaan, infrastruktur, dan semua unsur penunjang lainnya; (5) merekrut calon mahasiswa yang bermutu; (6) membentuk daya *think tank* institusi bagi calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri; (7) menyusun rekaman data yang diolah menjadi informasi untuk pelacakan kembali data dan informasi, registrasi sertifikasi sistem mutu ISO 9001-2000 oleh lembaga sertifikasi International, (8)

menyediakan dana yang menjamin peningkatan mutu internal serta akreditasi, secara berkala dan berkesinambungan.

4) *Monitoring dan Evaluasi rencana pengembangan Jurusan/program Studi*

Fokus utama monitoring dan evaluasi secara keseluruhan adalah untuk meneliti efektivitas dan efisiensi dari program pendidikan dan kebijakan dalam rangka pengembangan Jurusan/Program Studi. Sering kali evaluasi tidak selalu bermanfaat dalam kasus-kasus tertentu, oleh karenanya selain hasil evaluasi juga diperlukan informasi lain yang akan dipergunakan untuk pembuatan keputusan selanjutnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Demikian aktivitas tersebut terus-menerus dilakukan sehingga merupakan suatu proses peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Di lain pihak Hendyat Soetopo(2007:60) mengatakan, bahwa monitoring lebih menekankan pada proses pelaksanaan manajemen pengelolaan pendidikan: pembuatan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, pengelolaan PBM, evaluasi.

Sedangkan evaluasi lebih menekankan tagihan dari pada hasil pengelolaan program; Perbandingan sasaran yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai.

Mencermati pernyataan Soetopo (2007:60) tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dan manfaat monitoring dan evaluasi adalah memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan. Hasil monitoring untuk perbaikan pelaksanaan pengelolaan program. Sedangkan hasil evaluasi memberikan informasi yang tepat dijadikan masukan kepada keseluruhan komponen program pengelolaan program: dalam konteks, input, proses, output, outcome, dalam konsep pengelolaan program, dalam hal ini monitoring sama dengan evaluasi adalah bagian dari proses dalam totalitas pengelolaan program.

Dengan demikian maka tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut; (a) menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyeewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan, (b) mencegah terulangnya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan, (c) mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau mem-bina yang lebih baik, (d) menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, parti-sipasi, dan akuntabilitas organisasi, (e) meningkatkan kelancaran operasi organisasi, (f) meningkatkan kinerja organisasi, (g) memberikan opini atas kinerja

organisasi, (h) mempengaruhi manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada, (i) menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Di lain pihak Rohiyat (2003:81), berpandangan bahwa ada dua faktor utama yang harus diperhatikan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi yaitu internal dan eksternal.

Berkaitan dengan pengembangan jurusan/program studi. Monitoring dan evaluasi internal adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pengelolaan program sendiri. Pada umumnya, pelaksanaannya adalah warga pengelolaan program sendiri yaitu jurusan, dosen, mahasiswa siswa, orang tua siswa, warga pengelolaan program lainnya. Tujuannya tidak lain, adalah untuk mengetahui kemajuan dirinya sendiri (jurusan/program studi) sehubungan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi eksternal yakni dapat dilakukan oleh pihak eksternal pengelolaan program (eksternal institusional), misalnya Dinas Fakultas, Universitas, pengawas, dan perguruan tinggi atau gabungan dari keempatnya. Hasilnya dapat digunakan untuk: *rewards system* terhadap individu Jurusan, publik, perbaikan sistem yang ada secara keseluruhan, dan membantu Jurusan dalam mengembangkan diri.

BAB III

METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang menggambarkan keadaan dan gejala sesuai dengan apa adanya tanpa adanya perlakuan yang khusus. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2000: 309) bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Senada dengan pendapat di atas, Surahmad (1990:134) menyatakan bahwa penyelidikan dengan metode deskriptif bertujuan untuk memecahkan masalah pada masa sekarang, di antaranya ada penyelidikan dengan penuturan, analisis, dan klasifikasi. Metode ini bisa juga disebut metode analitik.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan merekonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penilaian ini dipilih karena gejala-gejala informasi, peristiwa, keterangan-keterangan dari hasil pengamatan selama berlangsungnya proses penelitian mengenai "Strategi Akselerasi Peningkatan Nilai Mutu Program Studi di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung" ini, akan lebih tepat bila diungkapkan dalam bentuk kata, kata. Disamping itu data yang didapat lebih mendalam dan lebih sebenarnya. Data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

2. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang komponen-komponen yang berkaitan dengan mutu Program Studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, dengan langkah-langkah berikut. Semua variable itu

merupakan variable independent yang akan dianalisis, artinya satu variable dengan variable yang lainnya tidak saling mempengaruhi

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data umum dan data khusus.

1. Data Umum

Data umum ialah data tentang: jumlah jurusan/program studi, jenis jurusan/program studi yang diselenggarakan, struktur organisasi lembaga, tenaga pendidikan, karyawan dan mahasiswa sarana dan prasarana pendidikan, sumber belajar yang tersedia, problema terkait yang dihadapi pesantren.

2. Data khusus

Data khusus ialah data yang dipandang primer dan secara langsung terkait erat dengan sasaran penelitian yang diinginkan. Jenis data ini meliputi: (1) pandangan tentang konsep pengembangan mutu jurusan/program studi; (2) tentang perspektif pengembangan mutu jurusan/program studi; (3) orientasi peningkatan mutu jurusan/program studi (orientasi, pengembangan, implementasi dan evaluasi); (4) tentang konsep disain pengembangan program peningkatan mutu jurusan/program studi; dan (5) bentuk pelaksanaan peningkatan mutu jurusan/program studi.

3. Sumber Data dan Lokasi Penelitian

1. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: Informan, sebagai informan awal dipilih secara *purposive*, obyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti *key informan*. Informasi selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjukan orang lain yang dapat memberikan informasi, dan kemudian informan ini diminta pula untuk menunjukan orang lain yang dapat memberikan informasi begitu seterusnya. Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan adalah: para Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jjati Bandung.

2. Lokasi Penelitian, Populasi, dan Sampel

Lokasi Penelitian, penelitian dilaksanakan pada seluruh Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung tahun 2011.

Sedangkan

Populasi yang terjangkau adalah 7 Program Studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung. Berdasarkan data yang diperoleh dari Jurusan/Program Studi tahun 2011 tersebut sebagai berikut : (1) Jurusan/Program Studi Matematika, (2) Jurusan/Program Studi Biologi, (3) Jurusan/Program Studi Fisika, (4) Jurusan/Program Studi Kimia, (5) Jurusan/Program Studi Teknik Informatika, (6) Jurusan/Program Studi Agro Teknologi, dan (7) Jurusan/Program Studi Teknik Elektro.

Sampel, sehubungan jumlah populasi dalam penelitian ini relative sedikit maka semua populasi dijadikan responden penelitian sehingga merupakan sampel total. Oleh karena jumlah populasi pada masing-masing kelompok relative berbeda terutama jumlah mahasiswa, dosen, sarana prasarana pendukung lainnya, maka dalam proses analisis akan ditinjau berdasarkan dan komponen-komponen yang mendukung terhadap nilai mutu jurusan/program studi.

3. Subjek Penelitian

Seperti dijelaskan pada bab pendahuluan bahwa penelitian ini dilakukan pada 7 Program Studi/Jurusan di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Subjek yang diteliti adalah komponen indikator nilai mutu program Studi dari hasil audit mutu maupun hasil akreditasi program studi oleh BAN-PT, sebagaimana pada tabel di bawah sebagai berikut:

- a. Masukan *input*, mencakup komponen: Visi dan misi program studi, sasaran dan tujuan, mahasiswa, sumberdaya manusia, kurikulum, sarana prasarana, dan pembiayaan.
- b. Proses *proces*, mencakup komponen: Tata pamong (governance), pengelolaan, program, kepemimpinan, proses pembelajaran, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Keluaran/Hasi *output*, mencakup komponen: Lulusan, keluran lainnya, publikasi hasil penelitian dan atau produk penelitian dalam bentuk patent, rancang bangun, prototip, perangkat lunak, dsb.
- d. Dampak *inpact*, mencakup komponen: Sistem informasi, sistem peningkatan dan penjaminan mutu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif mengkaji prespektif partisipan dengan multi strategi, strategi-stategi yang bersifat interaktif, seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap seperti foto, rekaman, dan lain-lain. Strategi penelitian fleksibel, menggunakan aneka kombinasi dari teknik-teknik untuk mendapatkan data yang valid (Sukmadinata, 2008: 95).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode-metode pengumpulan data seperti: observasi dan wawancara dan studi dokumenter yang dilakukan secara mendalam. Digunakannya kedua metode ini, karena dipandang kedua metode ini akan dapat memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menggali secara lebih mendalam berbagai permasalahan yang ingin digali dari penelitian ini.

1. Observasi

Observasi dilakukan mulai dari pengamatan menyeluruh terhadap pesantren yang akan diteliti. Pengamatan dimulai dari peristiwa-peristiwa yang utuh terjadi di pesantren, diantaranya: kegiatan rutinitas pesantren yang dilakukan oleh kiai, santri, tenaga pengajar dan staf pengelola pesantren. Selanjutnya pengamatan dilanjutkan pada hal-hal yang bersifat khusus menyangkut aspek-aspek yang terkait dengan tipologi kurikulum. Observasi, untuk memperoleh gambaran umum tentang mutu dari 7 jurusan/program studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Berita untuk melihat dari dekat proses Proses proses, mencakup komponen: Tata pamong (governance), pengelolaan, program, kepemimpinan, proses pembelajaran, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara, prosesnya dilakukan melalui tahap-tahap penentuan aktor yang diwawancarai, membuat persiapan wawancara, pertanyaan yang disesuaikan dengan sasaran dan data yang ingin digali, melakukan wawancara sesuai dengan yang diprogramkan. Wawancara, adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dengan sumber data, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Aplikasi teknik ini bertujuan untuk menghimpun informasi tentang data

umum mutu dari 7 jurusan/program studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada waktu penelitian pendahuluan.

3. Studi dokumenter

Studi dokumenter, yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data mutu program studi pada 7 program studi/jurusan di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung dari hasil evaluasi diri program studi tahun 20011, merupakan sumber data utama.

4. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yang dimaksud di sini adalah mempelajari berbagai informasi yang terdapat dalam berbagai referensi menggali konsep dan pedoman teknis tentang pelaksanaan mutu jurusan/program studi.

5. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data

Data dan fakta penelitian yang dikumpulkan dengan berbagai alat pengumpulan data, selanjutnya diolah dengan menggunakan cara-cara pengolahan data yang sesuai dengan penelitian naturalistik. Dalam hal ini dilakukan koding dan klasifikasi data yang selanjutnya dideskripsikan dengan rinci menurut jenis dan fungsi data.

Komponen-komponen data yang menjadi pendukung terhadap peningkatan mutu program studi adalah sebagai berikut:

- a. Data masukan *input*, mencakup komponen: (a) Visi dan misi program studi, (b) sasaran dan tujuan, (g) mahasiswa, (d) sumberdaya manusia, (e) kurikulum, (f) sarana prasarana, (g) pembiayaan.
- b. Data proses *proses*, mencakup komponen: (a) Tata pamong (governance), (b) pengelolaan program, (c) kepemimpinan, (d) proses pembelajaran, (e) suasana akademik, (f) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Data keluaran/hasil *output*, mencakup komponen: (a) Lulusan, (b) keluran lainnya, publikasi hasil penelitian dan atau produk penelitian dalam bentuk patent, rancang bangun, prototip, perangkat lunak, dsb.
- d. Data dampak *inpact*, mencakup komponen: (a) Sistem informasi, (b) sistem peningkatan dan penjaminan mutu.

2. Teknik Analisi Data

Data yang sudah diolah, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Meneliti ciri-ciri penting dari setiap jenis komponen yang mencerminkan peningkatan mutu jurusan/program studi.
- b. Mengelompokkan ciri-ciri yang sama dan memilah-milah ciri yang berbeda berdasarkan jenis komponen peningkatan mutu jurusan/program studi yang ingin digambarkan.
- c. Menganalisis keunggulan dan sekaligus kelemahan dari masing-masing bentuk dengan merujuk pada teori peningkatan mutu jurusan/program studi yang dipandang cocok.
- d. Mencoba menemukan format tipe ideal pengembangan mutu jurusan/program studi untuk dikembangkan jurusan/program studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung, dengan teori yang tepat.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. STRATEGI PENINGKATAN MUTU JURUSAN

Penyusunan strategi peningkatan mutu Jurusan/Prodi-prodi didasarkan pada kajian pemikiran strategis Fakultas Sains dan Teknologi UIN Bandung yang didasarkan pula pada hasil evaluasi tahunan Fakultas, evaluasi diri Universitas dan program strategis Pendidikan Tinggi Nasional yang tertuang dalam naskah HELTS. Beberapa prioritas program strategis yang perlu dilaksanakan dalam mempersiapkan Jurusan/Prodi-prodi yang mandiri dalam lingkungan *Islamic entrepreneurial university*, yaitu (1) Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan status Program Studi, (2) Optimalisasi kelembagaan dan (3) Peningkatan kompetensi human resources secara total.

Ketiga program strategis besar tersebut dirinci secara spesifik kedalam 5 bidang yaitu; (1) Organisasi dan Manajemen, (2) Pendidikan dan Kemahasiswaan, (3) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Kerja sama Institusional, dan (5) Bidang Penunjang Penyelenggaraan Jurusan/Program Studi

1. Bidang Organisasi dan Manajemen

- 1) Peningkatan status baik dalam skala Jurusan maupun program studi
- 2) Pengembangan sumber daya manusia
- 3) Penyelenggaraan sistem penjaminan mutu di tingkat program studi.
- 4) Penyelenggaraan manajemen kelembagaan yang mengacu kepada indikator kinerja yang jelas

2. Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan yang selalu adaptif dan relevan dengan kepentingan masyarakat.
- 2) Keterbatasan tenaga dosen baik secara kuantitas maupun kompetensi.
- 3) Peningkatan standart kompetensi kelulusan

3. Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Peningkatan kemampuan dan keahlian dosen dalam bidang penelitian melalui kegiatan workshop dan media aktualisasi.
- 2) Pengembangan kajian penelitian yang mengarah pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan keilmuan.

- 3) Diseminasi dan implementasi hasil penelitian yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Bidang Kerjasama Institusional

- 1) Pengembangan kerjasama dengan kalangan industri sebagai upaya berkelanjutan meningkatkan kompetensi dosen dan lulusan.
- 2) Pengembangan kerjasama dengan penyelenggara pendidikan di luar negeri.
- 3) Penyelenggaraan kerjasama dengan asosiasi-asosiasi keahlian.

5. Bidang Penunjang Penyelenggaraan

- 1) Pengembangan sarana penunjang pendidikan yang mampu memenuhi standard minimal pendidikan nasional.
- 2) Pengembangan sarana penunjang penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan secara administratif.

B. PROGRAM AKSELERASI PENINGKATAN MUTU JURUSAN

1. Bidang Organisasi dan Manajemen

Kebijakan Dasar

- 1) Pengembangan manajemen organisasi yang berbasis pada penguatan database Program Studi.
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan program kerja yang mengacu peningkatan kualitas kerja dalam menciptakan pelaksanaan organisasi yang profesional, sehat, transparan, dan akuntabel.
- 3) Peningkatan keragaman sumber dana di luar SPP dan praktikum untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan organisasi

Program Akserasi

- o Membentuk bidang penjaminan mutu dalam rangka peningkatan kualitas administrasi dan tenaga dosen.
- o Pembuatan Standart Operational Procedure (SOP) di setiap lini organisasi program studi yang selalu di up-date secara periodik.

- Peningkatan kualitas pendidikan, keahlian, dan kepribadian dosen untuk meningkatkan mutu pelayanan, sesuai SOP yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan audit manajemen dan keuangan secara kontinyu untuk menjamin pelaksanaan organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Pengembangan sumberdana berbasis pada potensi akademik dan non-akademik.
- Perluasan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan asing dalam mengembangkan riset-riset aplikatif dan berorientasi teoretik.

2. Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan

Sasaran Program

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang yang lebih spesifik sesuai dengan arah pengembangan dan core business dari program studi.
- 2) Sistem rekrutmen dosen juga diarahkan pada penguatan peminatan tersebut dengan pelibatan aktif pihak program studi.
- 3) Menjaga dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pelaksanaan program yang terukur dan evaluasi secara periodik dengan mengacu pada standar internasional.
- 4) Pemberian sarana pengembangan aktivitas mahasiswa sesuai dengan peminatan yang berkembang.
- 5) Mendorong bakat mahasiswa berpotensi untuk berprestasi.

Program Akserasi

- Mempersiapkan dosen untuk studi lanjut tingkat doktoral dan mengarahkan untuk pengambilan bidang sesuai dengan arah peminatan yang sudah ditetapkan.
- Evaluasi dan penyesuaian kurikulum yang periodik untuk menjaga kualitas pendidikan.
- Penyelenggaraan seminar, kuliah tamu dan workshop di masing-masing Program Studi.
- Pengiriman dosen ke acara-acara ilmiah seperti workshop, seminar nasional dan internasional secara rutin dan terprogram.
- Pelaksanaan program magang bagi dosen sesuai dengan arah peminatan yang ada di masing-masing Program Studi.
- Penyertaan aktif tenaga dosen ke dalam asosiasi- asosiasi kelimuan sebagai

upaya untuk pengembangan keilmuan dan perluasan network keilmuan.

- Penerbitan jurnal berdasarkan bidang kajian sebagai sarana publikasi penelitian dosen.
- Berlangganan jurnal internasional dalam rangka menambah wawasan pengetahuan teraktual.

3. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Sasaran Program

- 1) Meningkatkan kemauan dan kemampuan dosen dalam bidang penelitian
- 2) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan tenaga dosen dalam bidang penelitian.
- 3) Meningkatkan jumlah proposal penelitian yang dikirim ke persaingan di luar universitas.
- 4) Meningkatkan peran akademik dalam pengabdian kepada masyarakat.

Program Akserasi

- Menyelenggarakan workshop intensif semua program studi .
- Menerbitkan jurnal ilmiah lintas pengelola dan diproyeksikan sebagai media akademik yang kompetitif.
- Memberikan dorongan berupa insentif yang menarik bagi dosen yang hasil karyanya dimuat di media, baik media lokal, nasional maupun internasional tanpa membatasi strata dosen.
- Membuat dan mempublikasikan jaringan-jaringan informasi yang berkaitan dengan pemberian dana bantuan penelitian.
- Melakukan diseminasi informasi dan pengembangan keilmuan yang telah dilakukan di universitas dalam bentuk pelatihan-pelatihan keahlian dan konsultasi. Kegiatan ini bisa disinergikan dalam bentuk KKN.

4. Kerjasama Institusional

Sasaran Program

- 1) Pengembangan kerjasama institusional yang diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dosen dan kompetensi lulusan.
- 2) Pengembangan kerjasama institusional diarahkan pada pencitraan dan visi organisasi.

Program Akserasi

- Intensifikasi kerjasama yang telah terjalin dengan melakukan evaluasi untuk kemudian pengembangan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak.
- Menjalin kerjasama institusional yang mengarah pada lembaga pemerintah ditingkat pemerintahan pusat dan daerah. Lembaga legislatif, LSM, Perusahaan dan Lembaga donor yang bekerja di ruang lingkup bidang sains dan teknologi.
- Menjalin kerjasama dengan program studi di universitas negara maju yang dijadikan sebagai benchmarking.

5. Bidang Penunjang Penyelenggaraan

Sasaran Program

- 1) Pengembangan sarana prasarana yang direncanakan dengan jelas, terukur, dan mendukung penyelenggaraan operasional dengan orientasi pada kebutuhan pengembangan program studi.
- 2) Pengembangan laboratorium dengan kelengkapan tenaga yang memiliki kompetensi.
- 3) Peningkatan kesejahteraan dosen untuk meningkatkan kinerja melalui peningkatan kenyamanan bekerja, peningkatan pendapatan, dan kesehatan.

Program Akserasi

Pembangunan Sarana Prasarana

- Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dengan penambahan sarana yang memadai dan pengembangan jumlah referensi perpustakaan.
- Pengembangan sarana pembelajaran yang interaktif dengan dilengkapi dukungan multimedia.
- Pemasangan jaringan internet broadband dengan membuka hot spot akses ke dosen, dan seluruh mahasiswa secara gratis dan bisa diakses di ruang-ruang

perkuliahan.

- Peningkatan laboratorium untuk riset yang berhubungan dengan sains dan teknologi.

Program Peningkatan Kesejahteraan

- Menyelenggarakan wadah prestasi bagi dosen dengan memberikan penghargaan layak kepada dosen yang dinilai berprestasi.
- Memberikan sanksi secara tegas kepada dosen yang melakukan pelanggaran.
- Meningkatkan intensif pengajaran bagi dosen
- Menyelenggarakan koperasi lokal dalam rangka pemberdayaan usaha.

Program Peningkatan Kenyamanan Suasana Kerja

- Menyediakan ruangan kerja yang layak dan sehat dengan jaminan kebersihan.
- Memberi kemudahan akses ruangan kerja 24 jam kepada tenaga dosen sebagai upaya kemudahan dalam akses informasi.
- Menyediakan akses internet yang layak di setiap ruangan kerja dosen.
- Menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas olah raga sesuai dengan peminatan yang ada dengan teratur dan rutin.

C. INDIKATOR KINERJA PROGRAM AKSELERASI PENINGKATAN MUTU JURUSAN

1. Tabel Penyehatan Organisasi

PENYEHTAN ORGANISASI		
Program	Indikator	Kinerja yang akan dicapai
A. Pengembangan Capacity Building	1. Pengelolaan transisional menuju Jurusan 2. Kesiapan menerima desentralisasi lebih besar.	a. Terbentuknya organisasi dan manajemen transisional. b. Program-program Jurusan bisa dijalankan.

PENGEMBANGAN OTONOMI		
Program	Indikator	Kinerja yang akan dicapai
B. Pengembangan Struktur Pendanaan	1. Hibah Kompetisi	Mampu memperoleh dan mengelola dana hibah kompetisi ≥ 2 PHK per tahun.

	3. Sistem Penjaminan Mutu	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki perangkat organisasi dan dokumen mutu akademik. b. Terlaksananya audit mutu akademik secara periodik dan tertib. c. Penyebaran best practices baik di dalam maupun luar fakultas. d. Audit internal manajemen bidang akademik.
	4. Kapasitas Institusional.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapasitas pengelolaan aset, infrastruktur dan finansial yang efisien. b. Kapasitas pengelolaan SDM meningkat. c. Kapasitas Sistem Informasi dan Manajemen berbasis teknologi informasi (IT) meningkat.
	5. Tata Kelola	<p>Visi, misi, Tujuan mencapai standar kinerja normatif : layak, cukup, relevan, suasana Akademik yang menunjang, efektif, efisien, sustainable, dan produktif.</p> <p>Bekerjanya merit-based system dalam pengelolaan organisasi.</p>

2. Tabel Pengembangan Otonomi

	2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	a. Dana hibah= 45% dari dana total. b. Hibah dari Masyarakat = 10% dana total.
--	----------------------------------	---

3. Tabel Pengembangan Pendidikan

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN		
Program	Indikator	Kinerja yang akan dicapai
C. Pemerataan dan Perluasan akses pendidikan	1. daya tampung	Penambahan mahasiswa sesuai dengan rasio dosen: mahasiswa dengan tetap memperhitungkan kualitas, sarana dan prasarana.
	2. diversifikasi Pendidikan	Penekanan pada orientasi kelulusan berdasarkan peminatan.
D. Pengembangan Mutu dan Relevansi Pendidikan.	1. Peningkatan kualitas SDM	a. Dosen dengan pendidikan S2 = 100 % b. Dosen dengan pendidikan S3 = 40 % (kondisi tahun 2011) c. Computer literacy Dosen d. Jumlah dosen yang mampu berbahasa Inggris dengan skor toefl >500/Toeic >600 = 80% e. Jumlah publikasi buku ajar = 2/tahun f. Beban tenaga dosen = 12 sks/semester.

4. Tabel Pengembangan Kemahasiswaan

PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN		
Program	Indikator	Kinerja yang akan dicapai
G. Pengembangan Kemahasiswaan	1. Pembinaan Minat,Bakat, Penalaran dan Kesejahteraan mahasiswa.	a. Sasaran PMB = 100 % b. Penerima beasiswa = 100 orang/tahun c. Sumber beasiswa = 10 institusi atau sponsor. d. Sasaran tahunan pembinaan kesehatan dan kerohanian mahasiswa = 50 %
	2. Pengembangan Kelembagaan	a. Terjalinnnya koordinasi yang baik dengan lembaga di lingkungan Fakultas sains dan teknologi. b. Berfungsi secara optimal jaringan komunikasi dalam dan luar negeri. c. Tersusunnya AD dan ART Lembaga kemahasiswaan.
	3. Pengembangan sarana	a. tersedianya fasilitas ruang sekretariat lembaga kemahasiswaan. b. Terdistribusinya ATK dengan lembaga/unit aktivitas.
	4. Pendanaan	a. Terpenuhinya alokasi anggaran yang sesuai dengan rencana kegiatan. b. Akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran kemahasiswaan.
H. Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat	1. masyarakat sebagai tempat belajar	Optimalisasi interaksi kegiatan kemahasiswaan dengan masyarakat,dalam bentuk studi lapangan, pembinaan, pendampingan
	2. masyarakat sebagai sumber finansial	Terbentuknya jaringan kerja sama dengan beberapa unit UKM di masyarakat melalui program pendampingan, & pemberdayaan.

5. Tabel Pengembangan Kerjasama Institusional

PENGEMBANGAN KERJASAMA INSTITUSIONAL		
Program	Indikator	Kinerja yang akan dicapai
I. Pengembangan Kerjasama Institusional	1. kolaborasi	a. Peningkatan kerjasama dalam negeri (kabupaten/kotamadya/kota). b. Peningkatan kerjasama luar negeri c. Internal and eksternal resource sharing.
	2. internasionalisasi	a. Kerjasama regional dan internasional b. Standar kompetensi internasional

6. Tabel Penunjang Penyelenggaraan Program Studi

PENUNJANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI		
Program	Indikator	Kinerja yang akan dicapai
J. Penunjang penyelenggaraan	1. tertib administrasi dan peningkatan mutu layanan.	Mutu layanan semakin baik dan cepat
	2. peningkatan SDM	Kualitas SDM naik
	3. Anggaran dan aset	a. Data aset lengkap b. Mekanisme penggaran lebih akuntabel
	4. Sarana dan Prasarana	Kenyamanan kerja
	5. Kesejahteraan	a. Angka kehadiran meningkat b. Disiplin kerja meningkat c. Meningkatnya kesejahteraan dosen dan karyawan.

D. Langkah Solusional Akselerasi Peningkatan Mutu Jurusan

Langkah langkah solutif akselerasi peningkatan mutu Jurusan / Prodi-prodi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Bandung didasarkan pada hasil evaluasi tahunan Fakultas, evaluasi diri Universitas dan isu strategis Pendidikan Tinggi Nasional yang tertuang dalam naskah HELTS. Beberapa prioritas langkah program yang akan dilaksanakan dalam mempersiapkan Prodi-prodi yang mandiri dalam lingkungan *entrepreneurial university*, yaitu (1) Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan status

Program Studi, (2) Optimalisasi kelembagaan dan (3) Peningkatan kompetensi human resources secara total.

Ketiga langkah besar tersebut akan diterjemahkan secara spesifik kedalam 5 bidang yaitu; (1) Organisasi dan Manajemen, (2) Pendidikan dan Kemahasiswaan, (3) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Kerjasama Institusional, dan (5) Bidang Penunjang Penyelenggaraan Program Studi

1. Orgsnisasi Manajemen

a. Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan yang berdaya guna dan berhasil guna, dengan sasaran strukturisasi organisasi institusi. Indikator *Outputnya* adalah tertatanya struktur kelembagaan berdasarkan Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2005, Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan Keputusan Menteri Agama No. 486 Tahun 2002 tentang Statuta IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Outcome* yang dihasilkan adalah peningkatan kualitas fungsi pelayanan terhadap dosen, karyawan, dan mahasiswa dalam peningkatan kualitas akademik.

Program pengembangan kelembagaan demikian meliputi: (1) pengembangan unit-unit organisasi dan kelembagaan, (2) pengembangan program studi, (3) pengembangan dan penataan lembaga pelaksana akademik dan penunjang akademik, jurusan, program studi, laboratorium, studio, kebun percobaan, kebun praktek, perpustakaan.

b. Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas kinerja tenaga dosen dan karyawan, dengan sasaran terlaksananya peningkatan kualitas profesionalisme, kinerja dan produktifitas dosen dan karyawan. *Output-nya* adalah tersedianya dosen karyawan secara kuantitas dan kualitas serta. *Outcome* yang dihasilkan adalah meningkatnya kultur akademik di kalangan civitas akademika.

Program yang dibangun mencakup (1) usulan penerimaan tenaga edukatif dan karyawan, (2) pembinaan, pengawasan dan pengendalian berkala berbasis kinerja dan produktivitas, (3) program studi lanjut S-2 dan S-3 bagi dosen dan karyawan, (4) pelatihan bagi dosen dan karyawan dalam skill dan kinerja berbasis *enterpreneurship*, (5) peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan, (6) serta pemberian *reward and punishment* bagi dosen dan karyawan.

c. Sarana Prasarana

Pengembangan sarana prasarana diarahkan pada pengembangan sarana dan prasana yang menunjang seluruh kegiatan akademik dan kelembagaan, dengan Indikator *Output*-nya adalah tersedianya sarana dan prasana akademik dan penunjang akademik yang memadai, dan Indikator *Outcome*-nya adalah (1) meningkatnya prestasi akademik mahasiswa, (2) meningkatnya kultur akademik dan produktifitas karya-karya akademik dosen; (3) meningkatnya kelengkapan Fakultas.

Program pengembangan sarana prasarana meliputi: (1) penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang akademik yang memadai secara kuantitas dan kualitas, (2) penyempurnaan pola administrasi keuangan & perlengkapan, (3) peningkatan pelaksanaan anggaran secara terencana, efektif dan efisien, (4) Pemeliharaan sarana prasarana serta kekayaan Barang Miliki Negara (BMN) Fakultas Sains dan Teknologi.

d. Pendanaan

Program pengembangan pendanaan diarahkan pada upaya menciptakan kemampuan Fakultas menjamin pendanaan yang memadai untuk penyelenggaraan Tri Dharma UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara berkelanjutan. Usaha-usaha penggalangan dana dilakukan dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan fakultas, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas serta transparansi diupayakan menjiwai sistem pengelolaan dana tanpa meninggalkan kaidah-kaidah akuntansi yang benar, pengembangan Sistem Audit Internal (SAI) atau publik yang dapat menunjukkan sistem pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel. Pelaporan periodik yang akuntabel dan transparan yang menjamin terselenggaranya program akademik yang bermutu secara berkelanjutan. Indikator *Outputnya* adalah meningkatkan pemanfaatan dana secara efektif dan efisien. *Outcome* yang dihasilkan adalah terwujudnya laporan audit keuangan yang akuntabel.

Program pengembangannya meliputi: (1) memiliki laporan audit keuangan yang memuat keandalan sumber pendanaan dan pemanfaatannya; (1) memiliki data mengenai proporsi dana yang dialokasikan untuk pengembangan program akademik dibandingkan untuk pengembangan investasi pada aspek fisik, sarana, dan prasarana; (3) mempunyai sistem monitoring dan evaluasi pendanaan secara internal yang akuntabel terhadap semua unit kerja dengan persetujuan dari pimpinan yang berwenang; (4) memiliki mekanisme penerapan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa serta laporan proses pengambilan keputusan; (5) mampu menggalang dana untuk program akademik dari luar

institusi melalui kontrak kerja, kemitraan, hasil penelitian, karya akademik, dan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki.

e. Manajemen

Untuk mengelola program reguler maupun program-program pengembangan, Fakultas Sains dan Teknologi memerlukan sistem pengelolaan program studi mencakup pembagian fungsi dan wewenang yang jelas dan sistematis dalam alur kerja. Standard Operating Procedure (SOP) serta tanggung jawab setiap unit tata organisasi kelembagaan. Sistem pengelolaan kelembagaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengacu pada Perpres No. 57 tahun 2005 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN, dan PMA NO. 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dengan PMA No. 6 Tahun 2006 ini diatur struktur organisasi serta unit-unit kerja yang ada di lingkungan UIN, serta mengatur pula tentang tugas pokok, fungsi dan wewenang yang mencerminkan distribusi tugas dan wewenang (*job description*) masing-masing unit. PMA ini pula yang digunakan untuk mengatur dan memonitoring kinerja setiap unit kerja yang ada di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN. Sistem pengelolaan ini perlu ditunjang dengan prasarana dan sarana tugas pokok dan fungsi yang memadai agar unit-unit tersebut dapat melakukan layanan yang optimal, efektif dan efisien. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja setiap dipublikasikan kepada seluruh *stakeholders* untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Indikator *Outputnya* adalah terciptanya tatakelola *good governace* fakultas/jurusan dengan dengan prinsip C-TARF. *Outcome* yang dihasilkan adalah terwujudnya laporan audit keuangan yang akuntabel. Penerapan paradigma baru PT, dengan terakreditasinya Prodi/jurusan.

Program pengembangan sistem manajemen dilakukan dengan cara (a) sosialisasi aturan, norma, dan pedoman-pedoman yang terkait dengan penyelenggaraan institusi; (b) menyusun rancangan dan analisa jabatan, *job description*, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk menggambarkan terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit-unit kerja; (c) memantapkan dan mengoptimalkan proses manajemen yang memungkinkan unit-unit kerja menjalankan seluruh fungsi-fungsi manajemen; (d) memiliki kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja; (e) mengoperasionalkan pedoman tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP).

f. Perpustakaan

Pengembangan perpustakaan diarahkan pada upaya mewujudkan perpustakaan yang berkualitas, dalam rangka menciptakan fungsi perpustakaan sebagai *centre of intellectual, academic information, research, and reference*, Indikator *Outputnya* adalah tersedianya kuantitas dan kualitas sumberdaya perpustakaan. *Outcome* yang dihasilkan adalah meningkatnya pelayanan dan minat baca, dengan sasaran terwujudnya: (1) peningkatan kemampuan SDM perpustakaan, dan (2) meningkatnya kuantitas dan kualitas referensi, (3) peningkatan kualitas pelayanan dalam menunjang peningkatan kualitas akademik. Program pengembangannya meliputi penataan sistem pelayanan perpustakaan yang profesional berbasis Teknologi Informatika

2. Pendidikan Dan Kemahasiswaan

a. Kurikulum

Pengembangan kurikulum diarahkan pada upaya mewujudkan struktur kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat berlandaskan paradigma *Wahyu Memandu Ilmu*, dengan sasaran terwujudnya struktur kurikulum yang relevan dengan hakikat tujuan pendidikan di perguruan tinggi dan sesuai dengan kebutuhan dinamika perkembangan masyarakat, serta mengacu pada perubahan kurikulum yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. *Output* yang diinginkan adalah tersusunnya struktur Kurikulum program studi yang relevan dengan tujuan pendidikan tinggi dan kebutuhan masyarakat berlandaskan paradigma wahyu memandu ilmu, serta mengacu pada paradigma baru pengembangan pendidikan tinggi yang dirumuskan oleh UNESCO dengan formulasi pemberdayaan, otonomi, pemerataan akses bagi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. *Outcome* yang diinginkan adalah teraplikasikannya rancang bangun epistemologi keilmuan yang integralistik dan holistik dengan memperhatikan peningkatan kualitas kurikulum.

Program pengembangannya meliputi: (1) seminar dan lokakarya penyusunan Kurikulum semua program studi, (2) penyusunan pedoman kurikulum program studi dan sosialisasinya, (3) Pelaksanaan penyusunan kurikulum ilmu dipandu wahyu, serta (4) peningkatan fungsi dan peran konsorsium keilmuan dan *team teaching*.

b. Pembelajaran

Pengembangan pembelajaran diarahkan pada upaya meningkatkan mutu pembelajaran dalam rangka pengembangan akademik, dengan sasaran terselenggaranya kualitas proses

pembelajaran yang efisien dan efektif untuk mengembangkan pembelajaran berfikir yang kreatif dan inovatif. *Output* yang dihasilkan berupa peningkatan proses pembelajaran secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan *Outcome* yang dihasilkan adalah meningkatnya kemampuan akademik mahasiswa.

Program pengembangannya meliputi: (1) sosialisasi dan optimalisasi fungsi pedoman pelaksanaan kegiatan akademik, (2) penggandaan dan sosialisasi pedoman kerja praktik dan pedoman praktikum-praktikum, (3) pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran, (4) sosialisasi rancang bangun keilmuan paradigma wahyu memandu ilmu, (5) sosialisasi perubahan pembelajaran dari *teaching university* ke *research university*.

c. Kemahasiswaan dan Alumni

Pengembangan kemahasiswaan diarahkan pada upaya meningkatkan pembinaan mahasiswa dalam prestasi akademik dan kegiatan ekstrakurikuler, dengan sasaran meningkatnya daya intelektual, emosional, dan spiritual mahasiswa dalam keunggulan akademik, akidah, al-akhlak al-karimah, kewirausahaan, dan kepemimpinan, peningkatan fungsi lembaga kemahasiswaan dan produktifitasnya dalam pengembangan potensi, minat dan bakat mahasiswa. Kebijakan pokoknya adalah : (1) Peningkatan pembinaan mahasiswa dalam prestasi akademik, kultur akademik, dan *al-akhlak al-karimah*, (2) Peningkatan fungsi lembaga kemahasiswaan dalam pengembangan minat, bakat, kepemimpinan, keahlian, dan kewirausahaan. *Output* yang dihasilkan berupa: Meningkatnya kualitas akademik, al-akhlak al-karimah, kewirausahaan, kedisiplinan, dan kepemimpinan mahasiswa. *Outcome* yang dihasilkan adalah meningkatnya kemampuan akademik mahasiswa

Program pengembangannya meliputi: (1) Sosialisasi dan implementasi SK Dirjen Pendidikan Islam No. Dj. I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa PTAI, SK Dirjen Pendidikan Islam No. Dj. I/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI, dan SK Dirjen Pendidikan Islam No. Dj. I/254/2007 tentang Pedoman Umum Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK), (2) Intensifikasi Kegiatan Ekstra Kurikuler yang menunjang peningkatan intelektual, emosional, spiritual, al-akhlak al-karimah, kewirausahaan, kepemimpinan, (3) Training Kepemimpinan Mahasiswa tingkat Dasar dan Menengah, (4) Training Mengelola Hidup Merencanakan Masa Depan (MHMMD) dan *Emotional Spiritual Quation* (ESQ),

Lulusan merupakan produk langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN. Lulusan yang akan dikembangkan Fakultas adalah lulusan yang memiliki kualifikasi berikut: (1) memiliki kompetensi akademik maupun *soft skills* sebagaimana dinyatakan oleh sasaran mutu serta dibuktikan oleh kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesinya; (2) berperan penting dalam melakukan analisis data akademik seluruh program studi yang menggambarkan kinerja Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara keseluruhan untuk menilai karakteristik, profil dan pemetaan lulusan; (3) membantu lulusan mendapat pekerjaan dan meningkatkan interaksi antara lulusan dan institusi. (4) lahirnya mutu lulusan yang berkualifikasi keteguhan iman, keluasan ilmu, kemuliaan akhlak, dan keunggulan amal. Dengan kerangka ini, Fakultas Sains dan teknologi perlu memformulasikan mekanisme yang menjamin pemanfaatan hasil evaluasi dan pelacakan lulusan di tingkat institusi untuk pengembangan jurusan/program studi, serta pengembangan strategi pemasaran lulusan yang secara efektif bisa terserap oleh berbagai bidang profesi.

Program pengembangan lulusan mencakup upaya untuk: (1) penyusunan standard mutu lulusan yang kredibel; (2) penyusunan angka efisiensi edukasi yang ideal; (3) penyusunan pola masa tunggu lulusan untuk menyiapkan kemampuan bekerja relatif singkat; (4) penyusunan sistem data base lulusan yang bisa melacak data lulusan secara periodik; (5) penyusunan pola dan mekanisme evaluasi lulusan yang bisa digunakan sebagai umpan balik bagi institusi dalam menentukan kebijakan akademik; (6) penyelenggaraan layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan; (7) penyusunan, (8) pengembangan strategi pemasaran lulusan yang secara efektif bisa terserap oleh berbagai bidang profesi di masyarakat.

Sementara itu dalam program pengembangan dan pemberdayaan alumni di arahkan pada upaya pemberdayaan alumni sebagai asset strategis Fakultas Saintek, pendayagunaan aset material, penguatan jaringan antar dan intra alumni untuk pengembangan akademik dan fasilitas Fakultas Sains dan Teknologi serta optimalisasi fungsi kelembagaan alumni sebagai *stakeholders* penyelenggaraan Tri Dharma UIN SGD Bandung. Kebijakana pokoknya adalah: pemberdayaan dan optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan alumni. Sedangkan program pengembangannya meliputi: (1) Pendayagunaan aset material alumni melalui kerjasama antar dan intra alumni dalam rangka pengembangan akademik, (2)

penguatan jaringan antar dan intra alumni (3) pengembangan kerjasama dalam rangka penguatan dan optimalisasi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,

a. Penelitian

Pengembangan penelitian diarahkan pada upaya meningkatnya kualitas penelitian di kalangan civitas akademika dalam rangka membangun transformasi paradigma baru Fakultas Sains dan Teknologi sebagai pelaksana akademik dari UIN yang sedang berupaya beralih dari *teaching university* menuju *research university*. Dengan sasaran terwujudnya pondasi dan kerangka ilmiah yang tersistematisasikan dalam mencapai indikator dan standar *research university*. Kegiatan penelitian juga lebih diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan dan kualitas penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa baik secara kuantitas maupun kualitas. Indikator *Output*-nya adalah (1) Meningkatnya jumlah penelitian di kalangan civitas akademika, (2) Meningkatnya kualitas hasil penelitian. Indikator *Outcome* -nya adalah (1) Berkembangnya ilmu pengetahuan, (2) dan Terpublikasikan dan termanfaatkannya hasil penelitian.

Program pengembangannya meliputi: (1) Penyusunan pondasi dan kerangka ilmiah indikator dan standar *research university*, (2) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian bagi dosen dan mahasiswa, (3) Seminar hasil-hasil penelitian, (4) Sosialisasi dan publikasi hasil-hasil penelitian.

b. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengembangan bidang Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan pada upaya peningkatan implementasi ilmu dalam pemberdayaan masyarakat dan kontribusi peningkatan daya saing bangsa, dengan sasaran terwujudnya implementasi ilmu dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa, dengan Indikator *Outputnya* adalah (1) meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kesadaran beragama, (2) meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. *Outcome*: meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Fakultas Sains dan Teknologi.

Program pengembangannya meliputi: (1) penyusunan strategi pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan, (2) penyelenggaraan Kuliah Kerja Pengabdian (KKP) atau Kuliah Kerja Nyata (KKN), (3) optimalisasi peran dan fungsi kampus lingkungan, (5) rintisan pesantren teknologi binaan.

4. Kerjasama Institusional,

Pengembangan kerjasama diarahkan pada upaya menatalaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak yang menunjang peningkatan lembaga, dengan sasaran meningkatnya volume kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terwujudnya jaringan kerjasama antar lembaga perguruan tinggi, lembaga negara, pemerintah, swasta. Program kerjasama ditujukan dalam rangka menunjang peningkatan mutu akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan fasilitas Fakultas Sains dan Teknologi, atas dasar saling menguntungkan, baik secara moral maupun materiil sesuai dengan kepentingan Fakultas. Kerjasama dijalin dengan instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri, media massa, perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan Islam dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), lembaga donor, penerbitan, lembaga penelitian, lembaga sosial dan instansi-instansi yang mendukung pengembangan Fakultas Sains dan Teknologi di masa depan. Indikator *Output-nya* adalah Terselenggara-nya kemitraan dalam pembinaan mutu akademik. *Outcome-nya*, Terwujudnya jaringan kerjasama antar lembaga perguruan tinggi, lembaga negara, pemerintah, swasta.

Program pengembangannya mencakup: (1) Pemetaan jaringan kerjasama antar lembaga; (2) Pemantapan & optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak yang telah menandatangani MoU dengan UIN; (3) Pemantapan pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi, dalam dan luar negeri; (4) Pemantapan pengembangan kerjasama dengan pemerintah, swasta, LSM, Ormas, dan pengusaha.

5. Bidang Penunjang Penyelenggaraan

a. Sistem Informasi

Sistem informasi Fakultas Sains dan Teknologi dibangun dan dikembangkan dalam rangka memasuki kompetisi global dengan instrumen dasar penguasaan Sistem Informasi Terpadu. Sistem Informasi Terpadu dikembangkan untuk mendukung pengelolaan dan peningkatan mutu program akademik, administrasi, infrastruktur, jaringan, manajemen, keuangan. Sistem informasi yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan teknologi informatika yang mampu membentuk Sistem Informasi Terpadu data base, analisis, penyimpanan, mendapatkan kembali data. Presentasi data dan informasi serta komunikasi dengan pihak berkepentingan yang dibangun secara terpusat di tingkat fakultas dan terdistribusi pada unit-unit terkait. Data dan informasi yang dikembangkan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung meliputi sistem informasi

akademik, kemahasiswaan, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, administrasi dan keuangan serta data lain yang dianggap perlu untuk kepentingan berbagai pihak.

Pengembangan sistem informasi juga dimanfaatkan untuk memelihara komunikasi dan koordinasi internal serta kerjasama dengan institusi lain, pemerintah, alumni, perusahaan/industri atau masyarakat luas. Pengembangan teknologi informasi diarahkan untuk mampu melakukan pengelolaan yang profesional serta pemutahiran terhadap piranti keras dan lunak, sumber daya manusia serta organisasi pengelola untuk menjamin pertumbuhan sistem informasi yang telah dibangun tersebut. Sistem informasi yang dikembangkan juga diarahkan untuk menjamin akses bagi mahasiswa, staf dan sivitas akademika lainnya melalui peraturan-peraturan yang transparan. Indikator *Outputnya* adalah: Terwujudnya software sistem informasi berbasis *Information Technology* (IT).
Outcome: Terwujudnya akses informasi yang efektif bagi seluruh *stake holders*

Program sistem informasi yang dikembangkan mencakup: (a) penyusunan *blue print* pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi termasuk sistem yang mengatur aliran data, otorisasi akses data, dan sistem *disaster recovery*; (b) mengembangkan Sistem Informasi Terpadu, yang mencakup sistem informasi akademik, kepegawaian, administrasi, sarana prasarana, pendanaan, kerjasama, dan lainnya; (c) sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*) yang membantu pimpinan dalam melakukan perencanaan dan analisa evaluasi diri dengan lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih obyektif; (d) penyusunan basis data dan informasi yang mencakup keuangan, aset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, dosen dan tenaga pendukung; (e) sistem jaringan informasi Local Area Network (LAN) yang membangun komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi kampus; (f) pengembangan kapasitas internet dengan rasio *bandwidth* yang memadai bagi seluruh sivitas akademika.

b. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu Fakultas Sains dan Teknologi dibangun dan dikembangkan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu juga difungsikan sebagai bagian dari sistem pengelolaan dan proses pelaksanaan program-program akademik dan non akademik. Sistem penjaminan mutu dibentuk ditingkat universitas. Sistem penjaminan mutu disusun melalui pengorganisasian dan manual mutu yang memuat pernyataan mutu sebagai komitmen

institusi, kebijakan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja mutu. Dalam implementasi penjaminan mutu, perlu dilakukan penetapan sasaran mutu yang harus dicapai oleh unit-unit kerja sesuai dengan kapasitas dan kinerja masing-masing, mengembangkan mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan serta mengembangkan sistem penjaminan mutu untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan di tingkat nasional maupun internasional.

Monitoring dan evaluasi terhadap proses peningkatan mutu berkelanjutan dilakukan dengan berkoordinasi dengan pelaksana audit internal, untuk memberi masukan sebagai bahan tindakan perbaikan yang efektif. Untuk keperluan ini pula, perlu dikembangkan sistem rekaman data dan informasi yang baik mengenai proses serta hasil pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Rekaman data dan informasi yang baik dimaksudkan untuk memungkinkan pelacakan kembali data dan informasi yang diperlukan serta memberikan peringatan dini kepada pihak yang melakukan tindakan perbaikan. Hasil-hasil seluruh sistem penjaminan mutu yang terdokumentasikan dengan baik digunakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program penjaminan mutu eksternal termasuk program akreditasi. Indikator *Outputnya* adalah (1) Terwujudnya sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan pada tingkat internal dan eksternal. (2) Terwujudnya akreditasi institusi secara periodic. *Out come*: Fakultas Sains dan teknologi memiliki jaminan (quality assurance), pengendalian mutu (quality control), dan perbaikan mutu (quqlity impropmnt).

Program pengembangan Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan mencakup pengembangan : (1) sistem penjaminan mutu yang didukung data-data manual mutu, dan pelaksanaannya; (2) pengadaan dan pengorganisasian manual mutu; (3) implementasi penjaminan mutu; (4) menetapkan sasaran mutu, memonitor dan evaluasi pencapaian mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, SDM, kinerja, administrasi, pendanaan, infrastruktur, dan semua unsur penunjang lainnya; (5) merekrut calon mahasiswa yang bermutu; (6) membentuk daya *think tank* institusi bagi calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri; (7) menyusun rekaman data yang diolah menjadi informasi untuk pelacakan kembali data dan informasi, registrasi sertifikasi sistem mutu ISO 9001-2000 oleh lembaga sertifikasi International, (8) menyediakan dana yang menjamin peningkatan mutu internal serta akreditasi, secara berkala dan berkesinambungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian kondisi objektif, analisis KKPA (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) Jurusan/Program Studi pada Fakultas Sains dan Teknologi terdapat temuan kesimpulan hasil penelitian tentang strategi dan akselerasi peningkatan mutu jurusan/program studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi sebagai berikut:

1. Kondisi objektif analisis KKPA Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi dikelompokkan menjadi dua, yaitu kondisi Internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi Eksternal (Peluang dan Ancaman)
 - a. Kondisi Internal
 - 1) Adanya Kekuatan: (a) Kerja Sama yang baik antar dosen dan karyawan, (b) Input Mahasiswa yang selektif, (c) Dosen yang mempunyai banyak pengalaman praktis, (d) Banyaknya kerja sama yang telah dilakukan dengan lembaga luar dapat meningkatkan mutu dosen dan mahasiswa dengan sistem *link & match*.
 - 2) Kelemahan: (a) Belum adanya gedung sendiri menyebabkan keterbatasan penyediaan sarana akademik, (b) Masih terbatasnya program-program untuk peningkatan kualitas SDM terutama berkaitan dengan PBM, (c) Rekrutmen dosen belum sesuai dengan ketersediaan sarana, dan (d) Kerja sama dengan lembaga luar masih terbatas.
 - b. Eksternal
 - 1) Adanya Peluang: (a) kerjasama dengan Lembaga swasta dan pemerintah yang berhubungan erat dengan disiplin ilmu dalam hal penyediaan tenaga ahli telah meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa, (b) Dengan adanya pembangunan gedung baru dan fasilitas baru memungkinkan pengembangan laboratorium secara profesional bisa terwujud, (c) Banyaknya program beasiswa dari Pemerintah dan Asing yang mengarah kepada pembinaan dan peningkatan kualitas dosen belum dimanfaatkan.
 - 2) Adanya Ancaman: (a) Perkembangan penyelenggara pendidikan (PTN) serupa yang sudah terlebih dahulu lahir telah mempunyai tenaga dosen yang variatif dan spesifik, serta telah memiliki guru besar., (b) Kebutuhan industri yang mengacu kepada profesionalisme dan kesiapan kerja lulusan sesuai dengan standar dan tuntutan pasar industri belum bisa terpenuhi.
2. Komponen-komponen yang mendukung untuk peningkatan mutu jurusan yaitu:
 - a. Manajemen dan Kelembagaan: (1) Penyelenggaraan sistem penjaminan mutu di tingkat program studi, (2) Penyelenggaraan manajemen kelembagaan yang mengacu kepada indikator kinerja yang jelas, (3) Pengembangan kerjasama dengan kalangan industri sebagai upaya berkelanjutan meningkatkan kompetensi dosen dan lulusan, (4) Pengembangan kerjasama dengan penyelenggara pendidikan di dalam dan luar negeri, (4) Penyelenggaraan kerjasama dengan asosiasi-asosiasi keahlian.

- b. Pengembangan Infrastruktur pembelajaran melalui: Pengadaan barang praktikum sesuai mata kuliah dan jurusan, (1) Bekerjasama dengan PT lain dan lembaga yang sesuai dengan jurusan untuk melakukan praktikum, (2) Pengembangan sistem informasi akademik dan administrasi perkuliahan, (3) Penambahan buku di perpustakaan sesuai mata kuliah dan jurusan
 - c. Peningkatan kompetensi human resources: (a) Pelatihan dan diklat dosen/karyawan sesuai dengan keilmuan dan tanggung jawab, (b) Pemberian dana untuk penelitian, (c) Sertifikasi dan seminar untuk dosen, dan (d) Mendorong studi lanjut baik didalam maupun luar negeri.
3. Hasil program peningkatan mutu jurusan, secara kuantitas jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah penelitian, pengabdian dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Namun disisi lain hasil audit mutu internal dan hasil akreditasi program studi/jurusan belum memadai, dengan rata-rata nilai C.\
4. Kendala yang dihadapi peningkatan mutu jurusan/program studi adalah (a) Belum adanya mekanisme kontrol terhadap indikator keberhasilan. (b) Keterbatasan SDM dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang tinggi. (c) Tradisi Akademik yang masih mencari pola karena masih baru. (d) Masih terbatasnya program-program untuk peningkatan kualitas SDM terutama berkaitan dengan PBM. (e) Masih kurangnya informasi dalam pengembangan SDM. (f) Mekanisme evaluasi kinerja dosen belum berjalan secara maksimal. (g) Belum adanya gedung sendiri menyebabkan keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana akademik. (h) Masih terbatasnya tenaga dosen, menyebabkan banyak dosen luar biasa/kontrak yang harus diambil (i) Banyaknya beban SKS di setiap dosen, sehingga konsentrasi pada hasil karya ilmiah dan penelitian kurang maksimal.
5. Langkah-langkah atau upaya yang telah dilaksanakan dalam peningkatan mutu jurusan/program studi sebagai berikut, (a) pengembangan dan penataan lembaga pelaksana akademik dan penunjang akademik, jurusan, program studi, laboratorium, studio, kebun percobaan, kebun praktek, perpustakaan. (b) pembinaan, pengawasan dan pengendalian pegawai berkala berbasis kinerja dan produktivitas peningkatan pelaksanaan anggaran secara terencana, efektif dan efisien (c) peningkatan pelaksanaan anggaran secara terencana, efektif dan efisien, (d) mampu menggalang dana untuk program akademik dari luar institusi melalui kontrak kerja, kemitraan, hasil penelitian, karya akademik, dan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki, (e) meningkatnya kuantitas dan kualitas referensi, (f) seminar dan lokakarya penyusunan Kurikulum semua program studi sesuai kebutuhan mahasiswa dan pasar, (g) pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran, (h) Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil penelitian, (i) penyusunan strategi pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan, (j) Pemantapan & optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak (dalam dan luar negeri) yang telah menandatangani MoU dengan UIN, (k) mengembangkan Sistem Informasi Terpadu, yang mencakup sistem informasi akademik, kepegawaian, administrasi, sarana prasarana,

pendanaan, kerjasama, dan lainnya, (1) menetapkan sasaran mutu, memonitor dan evaluasi pencapaian mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, SDM, kinerja, administrasi, pendanaan, infrastruktur, dan semua unsur penunjang lainnya

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka secara substansial terdapat empat hal utama yang perlu dicermati, yaitu: (1) Tujuan Program Peningkatan mutu jurusan, (2) Pelaksanaan Peningkatan mutu jurusan (3) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, (4) Langkah-langkah strategis untuk efektifitas Peningkatan mutu Jurusan. Oleh karena itu untuk mereduksi sekaligus menyelesaikan problem tersebut, peneliti mengajukan rekomendasi:

1. Prodi/Jurusan /Fakultas/ UIN SGD Bandung, seyogyanya mengembangkan tujuan dan program kebijakan peningkatan mutu Jurusan/Program Studi secara selaras dengan visi, misi, tujuan, dan lingkungan, serta dilengkapi dengan kebijakan yang tegas menggariskan langkah-langkah prosedural dan teknis yang jelas sebagai petunjuk pelaksanaan operasional.
2. Prodi /Jurusan/Fakultas/ UIN SGD Bandung, seyogyanya dalam melaksanakan program kebijakan, dijalankan dengan prinsip kesesuaian antara kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai, serta melibatkan aspek-aspek internal dan eksternal yang dapat menjadi daya dukung sehingga satu program kebijakan dapat dilaksanakan secara tepat. Efektifitas pelaksanaan peningkatan mutu Jurusan harus didukung oleh beberapa program mendasar yaitu: (1) Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan status Program Studi, (2) Optimalisasi kelembagaan dan (3) Peningkatan kompetensi human resources secara total.
3. Prodi /Jurusan/Fakultas/ UIN SGD Bandung, seyogyanya dalam mengatasi belum optimalnya pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu Jurusan/Program Studi, membuat mekanisme teknis yang jelas dan tegas dengan pemberlakuan *law enforcement* (penegakan hukum) disertai dengan penetapan *reward and punishment* (hukuman dan penghargaan).
4. Upaya untuk melaksanakan akselerasi peningkatan mutu jurusan/program studi seyogyanya mengedepankan pelayanan bermutu dengan prinsip melayani bukan untuk dilayani dan pemberdayaan, melalui: (1) Pengembangan Infrastruktur, (2)Peningkatan status Program Studi, (3) Optimalisasi manajemen dan kelembagaan dan (4) Peningkatan kompetensi human resources secara total. Keempat langkah besar tersebut perlu diterjemahkan secara spesifik kedalam 5 bidang yaitu; (1) Peningkatan mutu Organisasi dan Manajemen, (2) Peningkatan

mutu Pendidikan dan Kemahasiswaan, (3) Peningkatan mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Peningkatan mutu Kerjasama Institusional, dan (5) Peningkatan mutu informasi dan Penjaminan mutu Penyelenggaraan Program Studi.

Rincian Langkah operasional dalam peningkatan mutu jurusan/program studi sebagai berikut:

- 1) Organisasi dan Manajemen: Meningkatkan organisasi dan manajemen secara berkesinambungan sistem pengelolaan institusi dengan cara (a) peningkatan evaluasi berkala yang dilakukan semua elemen yang terlibat dalam kegiatan akademik dan administrasi sarasanya adalah untuk mempekuat koordinasi dan sosialiasi program, (b) penguatan manajemen dengan cara mendokumentasikan data (database) setiap transaksi akademik dan admininstrasi
- 2) Pendidikan dan Kemahasiswaan: (a) Meningkatkan mutu akademik sesuai dengan baku mutu akademik nasional, mengimplementasikan semua penilaian mutu akademik dengan sasaran semua program studi terakreditasi A. (b) meningkatkan mutu pelajaran dengan mengimplementasikan kurikulum, SAP dan Silabus yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mahasiswa dengan sasaran mahasiswa dapat lulus dengan tepat. (c) Meningkatkan suasana dan budaya ilmiah dengan cara menciptakan kegiatan dan membangun fasilitas ilmiah yang memadai dengan sasaran 80% dosen dan mahasiswa mengikuti kegiatan ilmiah, 20% dosen mengikuti kegiatan ilmiah yang bertaraf nasional dan internasional serta 80% dosen dan mahasiswa menikmati layanan perusahaan.
- 3) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat: (a) Pengembangan kelompok penelitian (research group) dan pusat kajian dengan sasaran 20% Dosen memiliki dua publikasi per tahun di Journal Nasional Terakreditasi/Internasional atau Prosiding Konferenesi Internasional (b) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian di berbagai institusi, baik institusi pendidikan maupun non-pendidikan dengan sasaran Program pengembangan produk bersama dengan pihak industri dan Program kemitraan
- 4) Kerjasama Institusional: Meningkatkan *link & match* dengan dunia industri dan usaha dengan cara mengembangkan produk bersama dengan pihak industri dan usaha dengan sasaran untuk Meningkatkan kegiatan transfer teknologi untuk kepentingan masyarakat
- 5) Bidang Penunjang Penyelenggaraan: (a) Meningkatkan akses dan konektivitas antar-kampus sarasanya adalah akses jaringan nir kabel dapat diakses dengan mudah oleh civitas akademik, (b) layanan akademik dan administrasi terproses dan dapat dinikmati secara digital (elektronik), baik itu e-learning maupun e-Library dengan sasaran dosen dan mahasiswa memanfaatkan fasilitas multimedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Conny. R. Semiawan, (1999) *Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Dardjowidjojo, Soenjono (2000) *Pedoman Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Daulay, Haidar Putra (2007) *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- _____ (2004) *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Dollbeare, Kenneth (1975). *Public Policy Evaluation*. Beverly Hills, Sage Publication.
- Dror Yehezkel (1971) *Design for Policy Sciences*. New York, Elsevier
- _____ (1971). *Ventures in Policy Sciences*. New York, Elsevier
- Dubin, Robert (1968.) *Human Relations in Administration*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs USA.
- Dunn, William N. (1994). *Public Policy Analysis An Introduction*. Terj. Wibawa dkk. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- _____. (1994). *Public Policy Analysis. An Introduction*. New Jersey, Practice Hall Inc.
- Dye, Thomas R. (1981). *Understanding Public Policy*. New Jersey. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
- Edwards III, George C. (1980) *Implementing Public Policy*. Washington, Quarterly Press.
- Faisal, Sanapiah. (1995) *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta, Rajawali Press.
- Frederickson, H. George. (1988). *New Public Administration*. terj. Al-Ghozei Usman. *Administrasi Negara Baru*. Jakarta, LP3ES.
- Frohock, Fred M. (1979). *Public Policy: Scope and Logic*. Englewood Cliffs. New York, Prentice Hall.
- Furchan, Arief. (2004) *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media,
- Gall, Meredith D. and Gall, Joyce P and Borg, Walter R. (2003). *Educational Research*. Boston. USA.
- Gerston, Larry N. (1983) *Making Public Policy*. Glenview. III. Scott, Foresman.
- Gibson, James L., and Ivancevich, John M. and Donnelly Jr., James H. (1982) *Organization*. Terj. Djoerban Wahid. 1986. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta, Erlangga.
- Goggin, Malcolm L et al. (1990) *Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation*, Scott, Foresmann and Company, USA.

- Grindle, Merilee S. (1980) *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey.
- Indrajit, R. Eko, et.al. (2006) *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Koontz, Harold O'Donnell. Cyril. (1966) *Principles of Management*. Terj. M. Ridwan dan Anwar. Jakarta, Bharata.
- Lasswell, Harold D. (1971) *A Preview of Policy Sciences*. New York,
- Maleong Lexy, (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. (1983) *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Muchtar Buchari. (2001) *Pendidikan Antisipatoris*, Penerbit Kanisius Jakarta.
- Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. (1980) *The Politics of Policy Implementation*, St. Martin Press, New York.
- Quade, E.S. (1984) *Analysis For Public Decisions*, Elsevier Science Publishers, New York.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. (1986) *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Sabatier, Paul. (1986) "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48.
- Sanusi Uwes. (1999) *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen*, PT Logos Wacana Ilmu.
- Sahat Simamora. (1988) *A Framework for Political Analisis*. terj.. *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. Jakarta, Bina Aksara.
- Sarwoto, (1994) *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Sawyer., L.B., Dittenhofer, M.A. (2006), *Sawyer's Internal Auditing, The Practice of Modern Internal Auditing*, The Institute of Internal Auditing, 5th ed.,2003
- Sharkansky, Ira. (1978) *The Policy Predicament, Making and Implementing Public Policy*. San Francisco, WH Freeman and Company.
- Soetari Ad., Endang, (2007) *Pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam Dalam Akselerasi Pembangunan di Daerah*, *Jurnal FAI Uniga Edisi Ke-2 Desember 2007* (Online), <http://alimudin.multiply.com/favicon.ico> (diakses pada 20 Mei 2008).
- Sudjana, (2004) *Manajemen Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung,
- Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta, Ghaia Indonesia, 1990
- Sukmadinata, (2006) *Pengendalian Mutu Pendidikan* (konsep, Prinsip, dan Instumen), Reflika Aditama, Bandung,.
- Suyanto, (2006) *Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global)*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah,
- Suprayogo, Imam, (1999) *Reformulasi Visi Pendidikan Islam*. Malang: STAIN Press,
- Yusus, Choirul Fuad. (2006) *Inovasi Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Jakarta: Puslitbang pendidikan agama dan keagamaan DEPAG RI,

Tamin Feisal, (2004) *Reformasi Birokrasi (Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara)*. Penerbit PT Remaja Rosda Karya, Bandung.

Tampubolon P. (2001) *Perguruan Tinggi Bermutu*. Penerbit Blantika, Jakarta.

Tarigan, Antonius. (2000) *Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat*, Tesis Masigter Administrasi Publik UGM Yogyakarta.

Tilaar H. A. R. (2001) *Manajemen Pendidikan Nasional*. Penerbit Blantika, Jakarta.

Wahab, Solichin A. (1991) *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.

Wibawa, Samodra (1994) *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.

Winarno, Budi. (2002) *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, 2007

Departemen Agama RI-Dirjen Pendidikan Islam, *Panduan Pendirian PTAI di Lingkungan Departemen Agama*, www.ditperta.net/panduan.pdf (diakses pada 1 Mei 2008).

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam-Dirjen Pendidikan Islam DEPAG RI, et.al. *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di PTAI*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005.

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam-Dirjen Pendidikan Islam DEPAG RI, <http://www.ditperta.net/06/profil.asp> (diakses pada 20 Mei 2008).

Indonesia, Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 1999

KMA. Nomor 156 Tahun 2004, tentang Pedoman Pengawasan, pengendalian, dan Pembinaan Perguruan tinggi Agama Islam

KMA. Nomor 394 Tahun 2003, tentang Pedoman Perguruan Tinggi Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004–2009.

SK. Mendiknas, Nomor 184/U/2001 tentang *Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.